

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PENDIDIKAN DASAR
(Studi Kasus SDN 1 Brotonegaran)**

TESIS



Oleh

MUH. MUFLIKHUL ROFIQI IHWAN

NIM 502180037

**PROGRAM MAGISTER
PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Muflikhul Rofiqi Ihwan, Muh. 2020. *Sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar Sekolah Dasar negeri 1 Brotonegaran Ponorogo Tahun Pelajaran 2019/2020.* Tesis. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Mukhibat, M.Ag

Kata Kunci: Sistem, Penjaminan Mutu, Pendidikan Dasar

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peranan penting pemenuhan mutu dalam meningkatkan mutu internal satuan, di mana tingkat keberhasilan pembelajaran sangat didukung oleh pemenuhan mutu yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di lingkungan pendidikan setempat dan perkembangan akademik secara luas. SDN 1 Brotonegaran, Ponorogo melakukan langkah inovatif dalam penjaminan mutu, yaitu sistem penjaminan mutu internal. Permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana pemetaan standar mutu internal di SDN 1 Brotonegaran? (2) Bagaimana perencanaan standar mutu internal di SDN 1 Brotonegaran? (3) Bagaimana pelaksanaan standar mutu internal di SDN 1 Brotonegaran ? (4) Bagaimana monitoring dan monev standar mutu internal di SDN 1 Brotonegaran? (5) Bagaimana penetapan mutu baru di SDN 1 Brotonegaran? Jenis Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa: (1) Pemetaan mutu ditinjau dari 8 standar nasional pendidikan. Dari ke 8 standar nasional tersebut terpecah menjadi indikator dan sub indikator yang mendiskripsikan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau tidak. Pengambilan sub indikator berdasarkan nilai mutu yang masih memiliki kategori rendah, (2) Hasil dari perencanaan mutu berupa pemenuhan program kegiatan yang bertitik fokus pada standar sarana dan prasarana. Dalam hal ini karena mengacu pada hasil dari pemetaan mutu menjelaskan bahwa standar sarana dan prasarana mendapatkan nilai dengan kategori paling rendah. Maka dari itu dalam program kegiatan ini dapat direncanakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sekolah, (3) Menetapkan bahwa program yang harus dijalankan untuk program kegiatan kedepan yakni bertitik fokus ke standar sarana dan prasarana. Dalam hal ini ditemui bahwa capaian mutu yang paling rendah berada pada standar sarana dan prasarana dengan nilai mutu menurun -0,04 point pada kategori Menuju SNP 3, (4) Pengadaan rak pojok baca sangat lah berguna dan sangat membantu pendidik maupun peserta didik. Baik dalam mengembangkan wawasan atau dalam melakukan pembiasaan untuk membaca, (5) Penetapan standar mutu baru yang melampaui SNP akan menjadi modal ekstra bagi sekolah dalam upaya memperoleh status akreditasi terbaik.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Muh. Muflikhul Rofiqi Ihwan**, NIM 502180037, Program **Magister Prodi Manajemen Pendidikan Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: "*Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar (Studi Kasus SDN 1 Brotonegaran)*". ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 08 Mei 2020
Pembuat Pernyataan,



Muh. Muflikhul Rofiqi Ihwan
NIM 502180037

PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B sesuai SK BAN –PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
Program Manajemen Pendidikan Islam
Institut Agama Islam Ponorogo
Di
Ponorogo

NOTA PERSETUJUAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, membimbing, dan melakukan perbaikan seperlunya, maka tesis saudara:

Nama : Muh.Muflikhul Rofiqi Ihwan
NIM : 502180037
Dengan Judul : Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar (studi kasus di SDN 1 Brotonegaran)

Telah kami setuju dan dapat diujikan dalam ujian tesis Program Pascasarjana (S2) pada Prodi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Ponorogo.

Demikian persetujuan ini, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 05 Mei 2020
Pembimbing

Dr. MUKHIBAT, M.Ag.
NIP.197311062006041017

PONOROGO

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Muflikhul Rofiqi Ihwan

NIM : 502180037

Fakultas : Pascasarjana

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Judul Tesis : SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENDIDIKAN
DASAR (Studi Kasus SDN 1 Brotonegaran)

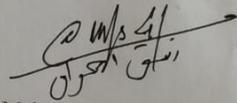
Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing.

Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 15 Juni 2020

Penulis



Muh. Muflikhul Rofiqi Ihwan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Permendikbud No. 28 Tahun 2016 bahwa penjaminan mutu pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan telah sesuai dengan standar mutu. Adapun yang dimaksud sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang berinteraksi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan.¹ Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan terutama berada pada satuan/program pendidikan. Penyelenggara satuan/ program pendidikan berkewajiban menyediakan dan memberikan bantuan dalam memenuhi standar. Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan supervisi,

¹ Permendikbud No. 28 Tahun 2016

pengawasan, evaluasi, fasilitasi, saran, arahan, dan bimbingan kepada satuan/program pendidikan.²

Pada tataran realitas secara global telah ditemukan bahwa era globalisasi adalah era persaingan mutu atau kualitas dari suatu produk. Kenyataan menunjukkan bahwa mutu lulusan tidak selalu dapat diterima. Banyaknya sekolah yang dibuka akan menurunkan mutu lulusan, karena standarisasi mutu lulusan tidak menjadi tujuan tetapi hanya dilihat dari aspek kuantitas yakni bagaimana mendapatkan jumlah siswa yang banyak. Sekolah sebagai wadah untuk menghasilkan kader-kader pemimpin bangsa, memerlukan suatu cara pengelolaan yang berbeda dengan pengelolaan instansi non pendidikan, karena dalam lingkungan pendidikan berkumpul orang-orang yang berilmu dan bernalar. Masalah penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana sistem penjaminan mutu dalam suatu manajemen yang rapi, efisien, dan transparan, serta akuntabel, sehingga memiliki arah yang jelas yakni mutu lulusan yang baik. Keberadaan

² Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), 1

desentralisasi Pendidikan Tinggi melalui kebijakan otonomi dan penjaminan mutu Pendidikan dasar.³

Berdasarkan informasi dari Kepala SDN 1 Brotonegaran Bahwa di sekolah kami telah menyusun tim penjaminan mutu pendidikan sekolah yang bermaksud untuk mempermudah suatu program kegiatan menjadi lebih ringan dan efektif. Tim penjaminan mutu tersebut melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah, Suatu kewajiban melaksanakan segala program yang telah direncanakan. Dalam hal ini berbanding lurus dengan apa yang telah direncanakan diawal. Ketika suatu program harus dilaksanakan, semua pemangku kepentingan hendaknya terlibat dalam program tersebut. Meskipun program tersebut dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan, Akan tetapi keterlibatan yang menjalankan program tersebut hanyalah beberapa pemangku kepentingan. Seharusnya semua yang mendapatkan tugas dalam suatu tim penjaminan mutu tersebut

³ Jurnal Alivermana Wiguna, *Upaya Meningkatkan sikap spiritual pada Peserta Didik*, <http://journal.umpo.ac.id/index.php/al-asasiyya/article/view/684/564>. Diakses pada tanggal 1 November 2019.

menjalankan bersama demi terwujudnya suatu mutu yang lebih baik.⁴

Realita diatas adalah masalah, yaitu pentingnya antusias dan pemahaman tentang SPMI dengan siklus yang telah ditetapkan bertujuan untuk peningkatan standar mutu internal (*search*). Siapa pelopor-pelopor (*actor*) yang mampu memberi solusi dari masalah tersebut, kegiatan-kegiatan apa (*activiti*) yang mereka lakukan serta di mana mereka melakukan kegiatan tersebut.

Dalam rangka mencari dan menentukan “*Social Situation*” yang tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan, perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Berdasarkan pemikiran para tokoh pendidikan di Indonesia, stakeholder yang utama yang mampu dalam meningkatkan mutu pendidikan, karena seorang guru harus mampu mendidik, membimbing, serta mengarahkan peserta didik kehal-hal yang bersifat positif.⁵

Diantara para steakholder tersebut, yang menduduki posisi terpenting untuk meningkatkan mutu

⁴ Widodo Santoso, *Sistem Penjaminan Mutu Internal*, Wawancra, Ponorogo, 1 November 2019

⁵ Ibid

pendidikan dasar adalah guru, karena gurulah yang setiap hari mendidik, membina dan memberi teladan yang baik ketika berada disekolah. Dimana dan kapan saja ia akan selalu dipandang sebagai teladan bagi anak didiknya serta ditiru oleh masyarakat.⁶

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar (Studi Kasus SDN 1 Brotonegaran Ponorogo Tahun Pelajaran 2019/2020).

B. Fokus Penelitian

Karena cakupan penelitian sistem penjaminan mutu internal yang luas maka penelitian ini difokuskan pada sistem penjaminan mutu internal pada pendidikan dasar.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemetaan sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar di SDN 1 Brotonegaran?
2. Bagaimana perencanaan sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar di SDN 1 Brotonegaran?
3. Bagaimana pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar di SDN 1 Brotonegaran?

⁶ Widah Djuhan, *Sosiologi Pendidikan*, (Ponorogo: STAIN Press, 2016), 57.

4. Bagaimana monitoring dan monev sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar di SDN 1 Brotonegaran?
5. Bagaimana mutu baru sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar di SDN 1 Brotonegaran?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan secara detail pemetaan sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar di SDN 1 Brotonegaran.
2. Untuk memaparkan segala perencanaan sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar di SDN 1 Brotonegaran.
3. Untuk menunjukkan seluruh hasil pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar di SDN 1 Brotonegaran.
4. Untuk menunjukkan seluruh hasil monitoring dan monev sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar di SDN 1 Brotonegaran.
5. Untuk menunjukkan seluruh hasil mutu baru sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar di SDN 1 Brotonegaran.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis akan menemukan sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi kepala sekolah

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan pola pembelajaran yang diharapkan mampu meningkatkan pola penerapan manajemen mutu terpadu dalam sekolah yang dipimpinnya.

b. Bagi Guru

Hasil penelitian ini sebagai masukan dalam rangka memotivasi diri dan pengembangan diri untuk meningkatkan proses pembelajaran sehingga mutu pendidikan yang diharapkan dapat terwujud.

c. Bagi Siswa

Hasil penelitian ini sebagai pengelolaan pola penerapan manajemen pembelajaran yang sesuai dengan standar maka penelitian ini diharapkan meningkatkan kreatif dan prestasi belajar siswa.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian memberikan wawasan yang lebih luas tentang pola penerapan manajemen

mutu terpadu, serta langkah perbaikannya sehingga peneliti dapat mengetahui langsung dan sekaligus mendapat kesempatan aplikasi manajemen mutu terpadu yang di sekolah.

F. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini ada beberapa karya ilmiah yang dianggap relevan dengan pembahasan mengenai sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar, diantaranya:

Penelitian Ahmad Abroza program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015. Dengan judul “Implementasi Sistem Manajemen Mutu Dalam Meningkatkan Proses Belajar Mengajar (Studi Multikasus di SMP Darul „Ulum Lampung Timur dan MTs Ma“arif NU 5 Sekampung Lampung Timur)”, dengan kesimpulan:

1. Proses pembelajaran dimulai dengan proses perencanaan pembelajaran, penetapan metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian belajar, proses pembelajaran harus diakhiri dengan tes formatif dalam rangka untuk mengevaluasi dan memberikan motivasi kepada siswa, proses

pembelajaran harus memberikan umpan balik yang positif.

2. Beban maksimal guru, sarana dan prasarana, dalam proses pembelajaran guru memberikan keteladanan, guru harus mampu menggunakan metode pengajaran, silabus dan pengajaran disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa.
3. Dalam melakukan evaluasi yaitu:
 - a) evaluasi ketrampilan mengajar,
 - b) evaluasi kepribadian,
 - c) evaluasi profesionalisme,
 - d) evaluasi dengan memanfaatkan siswa, dan
 - e) evaluasi dengan memanfaatkan wali siswa.
4. Kurang antusiasnya wali siswa dalam mengisi blangko saran dan kritik, masih ada guru yang belum maksimal dalam menggunakan *liquid crystal display* (LCD), belum meratanya jaminan kesehatan, masih ada beberapa guru kurang komitmen dalam menjalankan program standar mutu.⁷

⁷ <http://tesissikap-penjaminanmutu> Ahmad Abroza. Diakses pada tanggal: 1 November 2019.

Dari tesis di atas ada persamaan dan perbedaan dari judul peneliti, persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang mutu pendidikan, adapun perbedaannya yaitu implementasi sistem penjaminan mutu.

G. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Ketika berbicara tentang mutu, maka kita harus memiliki pemahaman yang sama tentang pengertian mutu. Sesuai dengan standar, sesuai dengan harapan pelanggan, sesuai dengan pihak-pihak yang terkait, atau sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam penetapan mutu dibutuhkan untuk menetapkan kesepakatan bersama tentang pandangan mutu sebuah proses atau produk. Standar mutu adalah acuan mutu yang digunakan bersama dalam membahas mutu. Acuan mutu yang digunakan dalam pendidikan dasar di Indonesia yakni Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kemendikbud.

Satuan pendidikan bisa dikatakan sudah menjalankan pendidikan yang bermutu jika telah memenuhi acuan mutu yang sudah ditetapkan pemerintah. Misalnya dengan menetapkan jumlah

peserta didik di kelas melebihi jumlah maksimal yang telah ditetapkan oleh SNP. Persyaratan jumlah maksimal peserta didik dalam setiap rombongan belajar sangat terkait dengan mutu pembelajaran. Jumlah maksimal setiap rombongan belajar adalah yang ditetapkan Permendiknas no.41 tahun 2007 adalah khususnya tingkat SD/MI adalah 28 peserta didik. Sering ditemukan satuan pendidikan memiliki peserta didik yang sangat banyak pada satu kelas, bahkan melebihi batas maksimal. Dari keterangan di atas penulis menemukan satuan pendidikan yang diteliti memiliki peserta didik sesuai dengan acuan mutu yang telah ditetapkan. Hal ini penulis bisa menyampaikan bahwa seorang guru dapat mengelola kelas sesuai dengan rencana pembelajaran yang dibuat. Dan guru pada kelas tersebut dapat memperhatikan peserta didik secara individual. Dalam hal ini salah satu standar mutu yang dapat tercapai sesuai dengan keinginan dan tujuan satuan pendidikan.

Berdasarkan fokus penulisan kami, penulis juga perlu menyampaikan pengertian dari SPMI yaitu sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dilaksanakan atau dijalankan oleh

seluruh komponen dalam satuan pendidikan yang mencakup seluruh aspek penyelenggara pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai SNP.

Untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*), sebagaimana diatur oleh Pasal 50 ayat (6) UU. Sisdiknas juncto Pasal 91 PP.No. 19 Tahun 2005 tentang SNP. Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous improvement/kaizen*), sehingga *stakeholders*, baik internal maupun eksternal, memperoleh kepuasan.⁸

Langkah penjaminan mutu internal dalam siklus terdiri atas:

⁸ <http://repository.unsda.ac.id/324/3/bab%202.pdf> di akses tgl 3 Desember 2019

1. Pemetaan Standar

Setelah penetapan standar mutu, kemudian satuan pendidikan memetakan mutu pendidikan dengan melakukan evaluasi diri yang menghasilkan peta mutu (capaian standar). Data evaluasi tersebut selanjutnya dianalisa untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan menentukan alternatif rekomendaasi atau alternatif solusi permasalahan. Pelaksanaan pemetaan mutu bisa dijalankan pada awal jika satuan pendidikan belum pernah melakukan EDS atau belum mengetahui kondisi aktual mereka.⁹

Misalkan, setelah melakukan pemetaan mutu diketahui bahwa sebagian guru yang masih mengajar tanpa mengaktifkan peserta didik yakni sebesar 20%. Sedangkan terkait dengan rata-rata UN di satuan pendidikan tersebut, diketahui bahwa rata-rata nilai UN peserta didik selama 2 tahun terakhir adalah 6,9. Setelah mengetahui kondisi faktual satuan pendidikan dalam pemenuhan standar, maka satuan pendidikan perlu mencari

⁹ Ridwan A. Sani dkk, *Sistem Penjaminan Mutu Internal*, (Tangerang: Tsmart, 2018), 33

penyebab permasalahan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan.

2. Penyusunan rencana pemenuhan

Selanjutnya satuan pendidikan membuat perencanaan pemenuhan mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu, dokumen kebijakan pendidikan pada level nasional, daerah, dan satuan pendidikan serta rencana strategis pengembangan satuan pendidikan. Hasil dari perencanaan satuan pendidikan dituangkan dalam dokumen perencanaan satuan pendidikan serta rencana aksi kegiatan. Rencana kegiatan yang dibuat harus terkait dengan upaya meningkatkan standar atau mencapai standar yang telah ditetapkan pada fase pertama.¹⁰

Misalkan, pada satuan pendidikan yang dicontohkan, dibuat rencana pembinaan khusus untuk guru-guru yang belum menerapkan pembelajaran aktif. Sedangkan untuk meningkatkan nilai UN, dibuat program peningkatan mutu pembelajaran yang memiliki nilai UN rendah.

¹⁰ Ibid, 33-34

3. Pelaksanaan pemenuhan mutu

Setelah rencana peningkatan mutu ditetapkan dan disepakati bersama komponen satuan pendidikan, maka selanjutnya pemenuhan mutu untuk pengelolaan satuan pendidikan dan kegiatan proses pembelajaran sesuai hasil perencanaan sehingga standar dapat dicapai.¹¹

Misalkan, kepala sekolah mengkoordinasikan guru dan peserta didik dalam upaya melaksanakan program yang telah direncanakan, menetapkan penanggungjawab program dan kekuatan-kegiatan sesuai rencana, bekerja sama dengan orang tua peserta didik, mengalokasikan dana yang dibutuhkan, dan memantau pelaksanaan kegiatan.

4. Evaluasi/audit mutu

Setelah melaksanakan pemenuhan mutu, selanjutnya tim penjaminan mutu sekolah (TPMS) melakukan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun untuk

¹¹ Ibid, 34

menjamin kepastian terjadinya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Pengendalian mutu dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi program/kegiatan atau melakukan audit untuk satuan pendidikan.¹²

Misalkan, dalam pembahasan evaluasi diri sekolah dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dengan melibatkan masing-masing pemangku kepentingan akan dapat menumbuhkan komitmen bersama dalam membangun sekolah yang bermutu.

5. Mutu baru

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu satuan pendidikan secara berkelanjutan, sehingga proses pendidikan di satuan pendidikan tersebut dapat memenuhi SNP. Maka satuan pendidikan dapat menetapkan standar baru dengan kualitas di atas SNP.

¹² Ibid, 35

H. Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.¹³

Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional kemudian dijabarkan pada Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum pasal 1 PP No. 19/2005, yang dimaksud dengan Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: (a) standar isi; (b) standar proses; (c) standar kompetensi lulusan; (d) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (e) standar sarana dan prasarana; (f) standar pengelolaan; (g) standar pembiayaan; dan (h) standar penilaian pendidikan.¹⁴

¹³ Imzakiah 2014 (<http://kiaelf.blogspot.co.id/2014/05/standar-nasional-pendidikan.html>) di akses pada tanggal 3 Desember 2019

¹⁴ Hamza B. Uno (https://scholar.google.co.id/scholar?cites=14190154992714899268&as_sdt=2005&scioldt=0.5&hl=id) di akses di akses pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 20:40

1. Standar isi

Menurut Fitri Yafrianti (2015) standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.

Tujuan standar isi ialah meningkatkan mutu pendidikan yang diarahkan untuk pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, seni, serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik.¹⁵

Menurut Milakarmila (2013) Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang

¹⁵ Fitri yafrianti 2015 (<http://sakura-ilmu.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-dan-hakikat-standar-isi.html>) di akses pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 21:41

dan jenis pendidikan tertentu, (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005).

Standar isi adalah suatu bagan rencana lingkup materi minimal, dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal, pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar Isi ditetapkan dengan peraturan menteri pendidikan nasional No. 22 Tahun 2006.

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan kedalam sejumlah peraturan antara lain peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dalam standar isi mencakup:

- a. Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan.
- b. Beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
- c. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan standar isi.
- d. Kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar Isi dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005.¹⁶

2. Standar Proses

Menurut nurul fauziah (2017) proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk

¹⁶ Milakarmila 2013 (<http://karya-karmilamila.blogspot.co.id/2013/01/standar-isi-makalah-kurikulum.html>) di akses pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 21.42

mencapai kompetensi lulusan. Standar proses mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran.¹⁷

Menurut Noviastrini Chemsunj (2010) standar proses pendidikan adalah suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana atau didesain dalam pelaksanaan pembelajaran.

Dasar hukum yang mengatur standar proses pendidikan terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran

¹⁷

pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.¹⁸

3. Standar Kompetensi Lulusan

Menurut Ainul Haris (2012) standar kompetensi lulusan (SKL) satuan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap, yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran.

SKL pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

SKL pada jenjang pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta

¹⁸ Novriantini chemsunj 2010 (<https://noviastrinich.amsunj.wordpress.com/2010/05/30/standar-proses-pendidikan/>) di akses pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 21.47

ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

SKL pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

Standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar Kompetensi Lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pelaksanaan SI-SKL Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24

Tahun 2006 menetapkan tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.¹⁹

4. Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Menurut Rina ratnasari (2012) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di bawah ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

A. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembeajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 28 ayat 1). Yang dimaksud dengan pendidik pada ketentuan ini adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan berkompetensi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, pamong pelajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta

¹⁹ Ainun haris 2012 (<http://nasrudinhadi.blogspot.co.id/2012/05/makalah-standar-kompetensi-lulusan-skl.html>) di akses pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 21:48

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang dimaksud dengan pendidik sebagai agen pembelajaran (learning agent) pada ketentuan ini adalah peran pendidik antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

- B. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku (pasal 28 ayat 2).
- C. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini.²⁰

5. Standar Sarana Dan Prasarana

Sarana pendidikan adalah perlatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan

²⁰

ratnasari 2012(<https://riedushine.wordpress.com/2012/12/31/standar-pendidik-dan-tenaga-kependidikan/>) di akses pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 21.51

dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, dan taman sekolah.²¹

Menurut Yamilah (2014) sarana pendidikan adalah fasilitas-fasilitas yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran tercapai. prasarana pendidikan merupakan segala sesuatu yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan.

Sarana dan prasarana pendidikan menjadi penting karena mutu pendidikan dapat ditingkatkan melalui pengadaan sarana dan prasarana.²²

²¹ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : Teras, 2009), 155

²² Yamilah 2014 (<http://yamilah2014.blogspot.co.id/2015/01/standar-sarana-dan-prasarana-pendidikan.html>) di akses pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 21:55

6. Standar Pengelolaan

Menurut Rieny Susilowati (2012) standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan. Standar pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah.

7. Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.²³

²³ Imzakiah 2014(<http://kiaelf.blogspot.co.id/2014/05/standar-nasional-pendidikan.html>) di akses pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 21:58

8. Standar Penilaian Pendidikan

Menurut Akhmat Sudrajat penilaian (*assessment*) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) peserta didik. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif (pernyataan naratif dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif (berupa angka). Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif tersebut secara khusus, dalam konteks pembelajaran di kelas, penilaian dilakukan untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan balik/perbaikan proses belajar mengajar, dan penentuan kenaikan kelas. Melalui penilaian dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan belajar peserta didik, guru, serta proses pembelajaran itu sendiri. Berdasarkan informasi

itu, dapat dibuat keputusan tentang pembelajaran, kesulitan peserta didik dan upaya bimbingan yang diperlukan serta keberadaan kurikulum itu sendiri.²⁴

I. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti melakukan pendekatan secara intensif untuk mencari data yang bisa menghasilkan data deskriptif dan secara alami semisal memantau pola manajemen madrasah, bertanya tentang proses yang terjadi, dan lain sebagainya. Peneliti melakukan pendekatan yang intensif selama proses penelitian terjadi dalam lapangan.

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan "pendekatan kualitatif" adalah sebagai prosedur penelitian penghasil data deskriptif yang berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku (tindakan) yang sedang diamati.²⁵

²⁴ Marito 2012 (<http://maritosukses.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-penilaian.html>) di akses pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 22:02

²⁵ Robert C. Bogdan & S.J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods* (New York: John Wiley, 1975), 5.

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis studi kasus. Pendekatan ini berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa dengan menafikan hal-hal yang bersifat kualitatif, jadi gejala-gejala yang akan ditemukan tidak mungkin untuk diukur oleh angka-angka, melainkan dengan penafsiran logis teoritis yang berlaku atau terbentuk begitu saja karena adanya realitas yang baru, yang menjadi indikasi signifikan untuk terciptanya konsep baru.²⁶

Di dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian studi kasus yang berkaitan dengan “Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar di SDN 1 Brotonegaran tahun ajaran 2019/2020”.

J. Kehadiran Peneliti

Peneliti adalah sebagai aktor pembantu pemecah masalah dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar di SDN 1 Brotonegaran tahun ajaran 2019/2020, dan menjadi observator pendukung pada kasus dan objek penelitian. Peneliti datang dan mulai

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 90.

meneliti pada pukul 08.00 WIB, yang bertempat di kantor Kepala sekolah SDN 1 Brotonегaran, Ruang TU, Ruang Guru, Ruang Kelas, Proses Pengajaran untuk mewawancarai beberapa guru yang mengetahui penjaminan mutu internal yang ada di sekolah ini. Berikutnya pada pukul 12.30 peneliti mengikuti beberapa perkumpulan mingguan untuk ikut serta dan merekam apa saja yang disampaikan dalam perkumpulan tersebut. Sistematika waktu bisa berubah tergantung dengan proses observasi.

K. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di SDN 1 Brotonегaran Ponorogo yang berlokasi di Desa Brotonегaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. SDN 1 Brotonегaran ini memiliki sistem pembelajaran yang efektif dan inovatif juga. Dan para guru diwajibkan membuat RPP sesuai bidang ajar yang dikoreksikan kepada guru senior. SDN 1 Brotonегaran memfasilitasi para guru dengan berbagai macam media pembelajaran untuk proses perkembangan materi, bahkan memiliki lab komputer yang bisa digunakan dan mempunyai jaringan wifi yang tersebar di beberapa tempat. SDN 1

Brotonegaran juga mengadakan evaluasi keguruan setiap minggunya guna mengembangkan dan meningkatkan keprofesionalan keguruan.

L. Data dan Sumber Data

Sumber data ini bisa didapatkan langsung dari penelitian dengan data kualitatif yang di bentuk dengan cara memadukan beberapa kata, tindakan, dokumentasi dan observasi serta menggunakan referensi untuk menguatkan suatu pendapat dalam suatu pemecahkan masalah.

Peneliti memasuki lapangan dan berusaha secara maksimal mengumpulkan segala macam jenis data apa saja yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Peneliti mencari info keberadaan data dan memulai mencari data berupa dokumen, foto, video, dan lain-lain, bahkan jika perlu peneliti harus mencari informasi dengan cara wawancara dengan narasumber guna menggali informasi, mencari dokumen ataupun berkas yang ada, serta mengikuti proses yang terjadi.

Menurut Lofland, sumber data utama di dalam penelitian kualitatif adalah kata dan tindakan, lainnya

adalah tambahan saja seperti dokumen dan lain-lain.²⁷ Berdasarkan penelitian ini, sumber dan jenis data adalah: kata-kata, tindakan, sumber tertulis, foto, dan statistik.

M. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memakai teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Ada tiga macam cara memakai teknik wawancara, yaitu:

1. Wawancara Terstruktur (Structured Interview)

Wawancara terstruktur dipakai sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh sebab itu, dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan.

²⁷ Lofland, *Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis* (Belmont, Cal: Wadsworth Publishing Company, 1984), 47.

2. Wawancara Semi Terstruktur (*Semi Structure Interview*)

Wawancara ini termasuk dalam in-dept interview. Untuk melakukan wawancara ini akan bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara jenis ini bertujuan untuk menemukan suatu permasalahan secara terbuka.

3. Wawancara Tidak Terstruktur (*Unstructure Interview*)

Wawancara tidak terstruktur adalah suatu wawancara bebas, yaitu peneliti tidak perlu menggunakan pedoman dalam wawancara yang sudah tersusun sistematis untuk pengumpulan datanya.²⁸

Penelitian ini, wawancara dilakukan kepada:

1. Bapak Widodo Santoso.,S.Pd.,M.Pd. sebagai Kepala Sekolah Negeri 1 Brotonegaran, beliau menjabat sebagai kepala Sekolah dari tahun 2016-sekarang. Sebagai pimpinan lembaga yang mengetahui bagaimana Sistem

²⁸ Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 190.

penjaminan mutu internal pendidikan dasar di SDN 1 Brotonegaran.

2. David Usmansyah, S.Pd.SD sebagai pelaksana kegiatan sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar di SDN 1 Brotonegaran.
3. Sella Hastaningtyas, S.Pd.SD TIM dalam sistem penjaminan mutu internal, adalah untuk melaksanakan kegiatan dalam sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar di SDN 1 Brotonegaran.
4. Roro Pathirthan, siswa Sekolah Negeri 1 Brotonegaran. Objek dari pelaksana kegiatan sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar di SDN 1 Brotonegaran.
5. Seni Wali Murid Sekolah Negeri 1 Brotonegaran. Sebagai penerima layanan sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar SDN 1 Brotonegaran.

Peneliti melakukan proses wawancara terhadap narasumber di lapangan guna menggali informasi terhadap suatu hal terkait ataupun beberapa informasi yang dibutuhkan. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber dengan cara memastikan

kesediaan narasumber untuk memberikan informasi untuk menanyakan kepada narasumber tentang hal terkait entah dalam keadaan formal tersrtuktur ataupun non-formal yang fleksibel.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Observasi terdiri dari berbagai macam data sebagai berikut:

1. Observasi partisipatif

Observasi merupakan suatu dasar ilmu dalam pengetahuan. Para ilmuwan hanya bekerja sesuai fakta tentang dunia nyata yang diperolehnya dalam observasi. Data dikumpulkan oleh panca indra atau menggunakan bantuan alat yang canggih, hingga benda yang kecil dan jauh dapat diobservasi dengan jelas.

2. Observasi tersamar atau terus terang

Dalam pengumpulan data, peneliti akan menyatakan langsung kepada sumber data bahwa ia melakukan suatu penelitian. Jadi,

mereka yang akan diteliti akan tahu sejak awal sampai akhir yang dilakukan sang peneliti.

3. Observasi tak berstruktur

Penelitian kualitatif, observasi akan dilakukan dengan cara tidak terstruktur, karena hanya fokus dalam penelitian yang belum jelas. Observasi akan fokus dan berkembang selama kegiatan yang akan dilakukan. Observasi tidak terstruktur merupakan observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang yang akan diobservasi.²⁹

Peneliti mengobservasi lapangan guna mengumpulkan data melalui aktifitas sehari-hari objek penelitian, serta memantau dengan detail tentang proses apa yang terjadi. Selama di lapangan peneliti membuat catatan kaki secara luas untuk objek observasi, setelah itu memulai untuk observasi yang terfokus dan dilakukan secara berulang-ulang, setelah itu peneliti mengambil kesimpulan dari fokus

²⁹ Ibid, 186.

penelitian yang telah di buat dan proses ini terus dilakukan sampai menemukan data yang di cari.

Hasil dari observasi dalam penelitian akan dicatat dalam catatan lapangan. Catatan lapangan adalah alat yang penting untuk penelitian kualitatif. Sebagaimana dikatakan oleh Bogdan dan Biklen bahwa seorang peneliti saat di lapangan harus membuat suatu catatan, setelah pulang barulah menyusun catatan lapangan. Sebab ”jantung penelitian” dalam konteks penelitian kualitatif yaitu catatan lapangan. Catatan tersebut menurut Bogdan dan Biklen adalah catatan yang tertulis tentang apa yang sudah didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan untuk pengumpulan data dan refleksi data dalam penelitian kualitatif.³⁰

³⁰ Lihat dalam Robert C. Bogdan dan Biklen, *Qualitative Research for Education; An introduction to theory and methods* (Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1982), 74.

c. Dokumentasi atau Dokumenter

Peneliti mengumpulkan data dalam lapangan dengan cara mengumpulkan dokumentasi foto, video, maupun rekaman yang ada ataupun melakukan proses tersebut sendiri. Guna membuktikan kejadian lapangan secara real maupun untuk membuktikan data dan mengunci data dalam media agar data yang diperoleh hilang ataupun lupa.

Menurut Lincoln dan Guba ada beberapa alasan mengapa teknik dokumentasi dapat digunakan dalam proses penelitian. Pertama, sumber ini selalu tersedia dan murah terutama ditinjau dari konsumsi waktu. Kedua, rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang stabil, baik keakuratannya dalam merefleksikan situasi yang terjadi di masa lampau, maupun dapat dan dianalisis kembali tanpa mengalami perubahan. Ketiga, rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang kaya, secara kontekstual relevan dan mendasar dalam konteksnya. Keempat, sumber

ini sering merupakan pernyataan yang legal yang dapat memenuhi akuntabilitas.³¹

N. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data dalam Satu Situasi Sosial

Analisis data adalah suatu proses dalam penyusunan data agar bisa diinterpretasi. Penyusunan data berarti suatu klasifikasi data yang menggunakan suatu pola, tema, dan kategori tertentu. Dalam setiap penafsiran data akan memberikan suatu makna kepada analisis. Langkah pertama dalam analisis ini adalah dengan penyusunan unsur-unsur data yang lemah secara empiris sehingga lebih bermakna, reinterpretasi data dengan melalui hubungan-hubungan dan akurasi hubungan data, serta akan melakukan perubahan yang mengarahkan kepada pengumpulan data untuk mempermudah dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya.³²

Setelah melalui suatu proses reduksi data serta

³¹ Lihat dalam Robert C. Bogdan dan Biklen, *Qualitative Research for Education; An introduction to theory and methods* (Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1982), 229.

³² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 190.

display data, peneliti akan membuat kesimpulan. Kesimpulan ini masih bersifat sementara dan akan dirubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung dalam tahap pengumpulan data selanjutnya. Jika kesimpulan ini sudah didukung adanya bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan untuk pengumpulan data, maka kesimpulan akan kredibel.

Sedangkan teknik analisis menggunakan teknik analisis data dengan model Miles dan Huberman yang meliputi:

1. Reduksi data

Diartikan untuk proses pemilihan, pemusatan perhatian dalam penyederhanaan data, pengabstrakan dari tranformasi data besar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang ada di lapangan.

2. Penyajian data (Data Display)

Penyajian kumpulan informasi sistematis yang akan memberikan kemungkinan adanya suatu penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

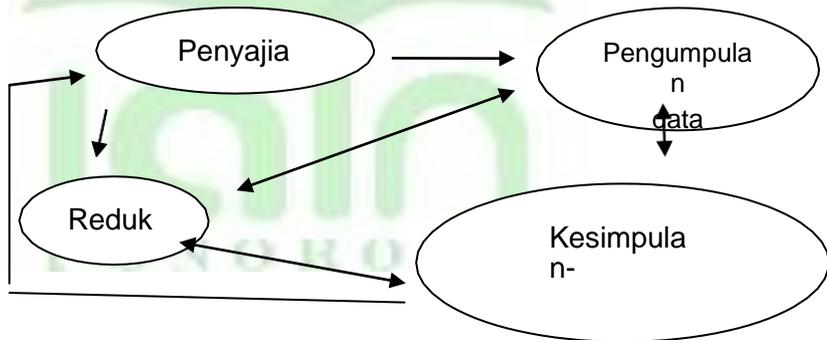
3. Penarikan kesimpulan(verifikasi).

Dilakukan sejak awal, pengumpulan data,

pembuatan pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, dan alur sebab akibat serta proposisi.³³

Peneliti akan mulai menganalisis seluruh hasil data yang sudah diperoleh dari hasil penelitiannya dan di kumpulkan menjadi satu untuk merangkai dan pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah di dapat dari lapangan.

Peneliti akan memulai memproses analisis data lebih lanjut seperti absah, berbobot dan kuat sedangkan yang tidak menunjang, lemah, dan menyimpang dipisahkan. Mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan satu cara atau lebih, peneliti akan mendapatkan suatu informasi yang mendukung tercapainya tujuan penelitian.



³³ Ibid, 95

Analisis data merupakan suatu proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, jadi akan lebih mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan dapat diceritakan kepada orang lain.³⁴

³⁴ *Analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, field notes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others. Lihat dalam Robert C. Bogdan dan Biklen, *Qualitative Research for Education, An introduction to theory and methods*, 157.*

BAB II

PROFIL SDN 1 BROTONEGARAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian³⁵

a. Nama sekolah : SD Negeri 1 Brotonegaran

Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 56
Kelurahan Brotonegaran
Kecamatan Ponorogo
Kabupaten Ponorogo
No. Telepon (0352) 482049
E – mail :
sdn1brotonegaran@yahoo.com

Lintang : -7.8756

Bujur : 111.4612

NPSN : 20510342

NSS : 101051117005

NSB : -

NISN : 100050

NPWP : 00.511.674.4.647.000

³⁵ Lihat transkrip dokumentasi 04/D/17-XII/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian.

NO. REKENING BOS :
0202405380 (BANK JATIM)

NO. REK BOS GIRO :
0201016258 (BANK JATIM
GIRO)

- b. Tahun didirikan : 1916
- c. Tahun beroperasi : 1916
- d. Tahun terakhir direhab : 2016
- e. Status tanah : Milik Sekolah /
milik Pemerintah Daerah.

B. Sejarah Berdirinya Sekolah Dasar Negeri Brotonegaran

Awal mula berdirinya SDN 1 Brotonegaran didirikan oleh putra carik Mangkujayan yang bernama Cipto Mangun Harjo pada tahun 1916. Sekolah itu bernama *Underwhise*, kepala sekolahnya bernama Narto Sudibyو. Sekolah tersebut adalah peninggalan Belanda. Awal mulanya sekolah tersebut hanya diperuntukkan untuk anak-anak dari kalangan pegawai, lurah dan sebagainya. Guru-guru yang mengajar tidak mendapat gaji, mereka hanya mendapatkan bengkok

sawah (tanah garapan) sebagai ganti gaji mereka, atau biasa disebut *schol pone*.

Kemudian pada tahun 1952 sekolah itu direnovasi dan diberi nama “Sekolah Rakyat Bakti” di Ponorogo. Kemudian pada tahun 1960-an sekolah rakyat tersebut “Sekolah Dasar Bakti”. Pergantian Sekolah Dasar Bakti menjadi “SDN 1 Brotonegaran” tepatnya pada tahun 1982³⁶.

C. Letak Geografis Sekolah Dasar Negeri Brotonegaran

Sekolah Dasar Negeri 1 Brotonegaran terletak di Kelurahan Brotonegaran, tepatnya di jalan Gatot Subroto No. 56 Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Jarak dari pemerintahan Kecamatan = 6 km Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten = 1 km Jarak dari pusat pemerintahan Provinsi = 200 km

Bangunan gedung Sekolah Dasar Negeri 1 Brotonegaran berada di dekat pemukiman warga Kelurahan Brotonegaran yang letaknya:

³⁶ Lihat transkrip dokumentasi 05/D/17-XII/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian.

- a) mudah dijangkau oleh semua siswa,
- b) luas halamannya cukup, sehingga anak dapat bermain sewaktu istirahat dan tanahnya mudah kering, dan
- c) lingkungan sekitarnya juga mendukung dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Jadi bila ditinjau dari segi kepentingan pelaksanaan pendidikan, sekolah tersebut adalah mempunyai letak geografis yang sangat mendukung. Hal ini karena adanya faktor-faktor kedamaian, ketenangan, dan keamanan lingkungan serta jauh dari hal-hal yang banyak tendensi pengaruh negatif seperti: pusat keramaian, pasar-pasar dan lain-lain yang mengurangi ketenangan dan kenyamanannya, sehingga dari ini tidak menutup kemungkinan bahkan terbuka lebar pelaksanaan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Brotonegaran akan berhasil baik apabila di dukung penangan-penangan dari tenaga pendidik yang profesional

dan fasilitas-fasilitas yang mencukupi, baik segi kualitas maupun kuantitasnya.³⁷

D. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Dasar Negeri Brotonegaran

Sebagai lembaga pendidikan yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, SDN 1 Brotonegaran memiliki visi, misi dan tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Visi³⁸

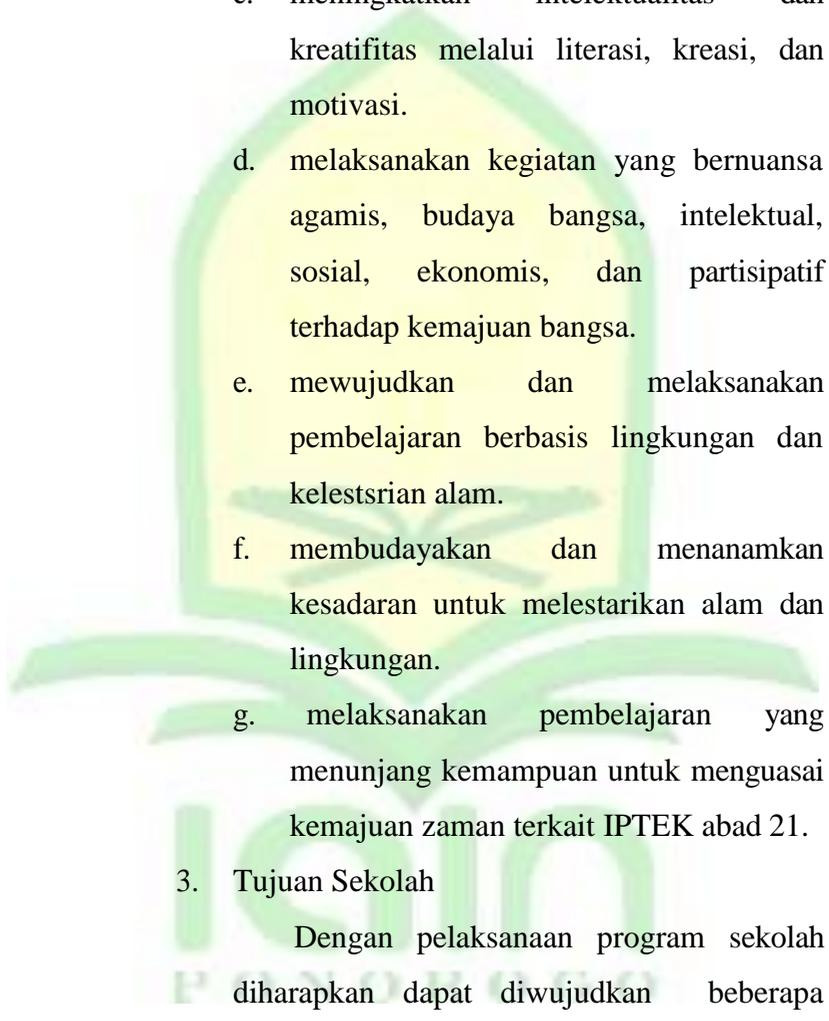
MENJADIKAN WARGA
SEKOLAH INSAN PANCASILAIS,
BERBUDAYA, DAN MENGUASAI IPTEK
ABAD 21.

2. Misi

a. menamkan dan memantapkan karakter
pancasila dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara,
dan beragama.

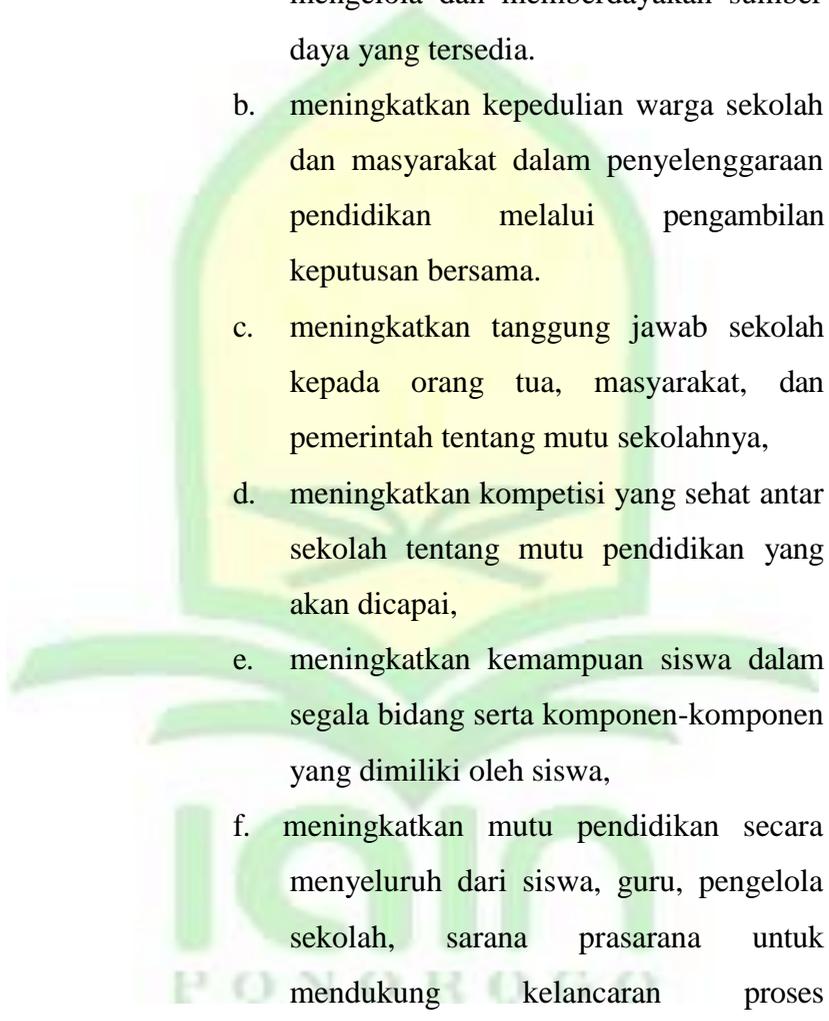
³⁷Lihat transkrip dokumentasi 01/D/17-XII/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian.

³⁸ Lihat transkrip dokumentasi 06/D/17-XII/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian.

- 
- b. meningkatkan proses dan hasil pembelajaran yang efektif dan efisien.
 - c. meningkatkan intelektualitas dan kreatifitas melalui literasi, kreasi, dan motivasi.
 - d. melaksanakan kegiatan yang bernuansa agamis, budaya bangsa, intelektual, sosial, ekonomis, dan partisipatif terhadap kemajuan bangsa.
 - e. mewujudkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis lingkungan dan kelestarian alam.
 - f. membudayakan dan menanamkan kesadaran untuk melestarikan alam dan lingkungan.
 - g. melaksanakan pembelajaran yang menunjang kemampuan untuk menguasai kemajuan zaman terkait IPTEK abad 21.

3. Tujuan Sekolah

Dengan pelaksanaan program sekolah diharapkan dapat diwujudkan beberapa tujuan sebagai berikut:

- 
- a. meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.
 - b. meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
 - c. meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya,
 - d. meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai,
 - e. meningkatkan kemampuan siswa dalam segala bidang serta komponen-komponen yang dimiliki oleh siswa,
 - f. meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh dari siswa, guru, pengelola sekolah, sarana prasarana untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran,

- g. berupaya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi sekolah.

E. Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri 1 Brotonegaran

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran. Dengan adanya sarana prasarana yang memadai, proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai dengan maksimal seperti yang diharapkan.

Berikut ini sarana prasarana dan Keadaan Fisik yang ada di Sekolah Dasar Negeri 1 Brotonegaran yakni³⁹:

³⁹ Lihat transkrip dokumentasi 02/D/17-XII/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian.

Tabel 2.1

Kriteria	Satuan	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Jumlah Total Ruang Kelas	Kelas	V			6
Kapasitas Maksimum	Orang	V			32
Rata-rata lus kelas	M2	V			61
Ratio Luas Ruang Kelas	Orang/m2	V			6
Rata-rata lebar ruang kelas	M2	V			8
Perabot					
Jumlah Kursi Siswa	Buah	V			103
Jumlah Meja Siswa	Buah	V			53
Jumlah Meja guru	Buah	V			6

Jumlah lemari di kelas	Buah	V			6
Jumlah papan panjang	Buah	V			
Jumlah papan tulis	Buah	V			6
Jumlah tempat sampah	Buah	V			6
Jumlah tempat cuci tangan	Buah	V			
Jumlah jam dinding	Buah	V			6
Jumlah stop kontak listrik	Buah	V			

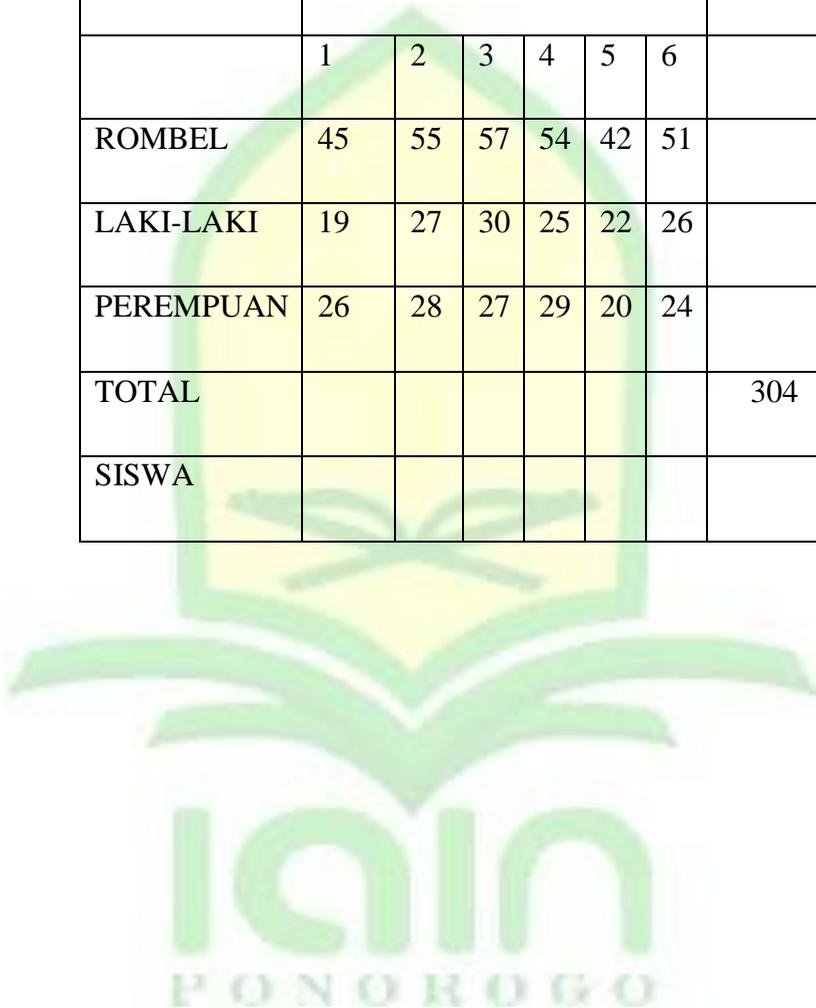
F. Keadaan Siswa Sekolah Dasar Negeri Brotonegaran

Jumlah siswa Sekolah Dasar Negeri Brotonegaran tahun ajaran 2019/2020 adalah 304 siswa, Dengan perincian sebagai berikut⁴⁰:

⁴⁰Lihat transkrip dokumentasi 03/D/17-XII/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian.

Tabel 2.10

	KELAS						TOTAL
	1	2	3	4	5	6	
ROMBEL	45	55	57	54	42	51	
LAKI-LAKI	19	27	30	25	22	26	
PEREMPUAN	26	28	27	29	20	24	
TOTAL							304
SISWA							



BAB III

PEMETAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENDIDIKAN DASAR DI SDN 1 BROTONEGARAN

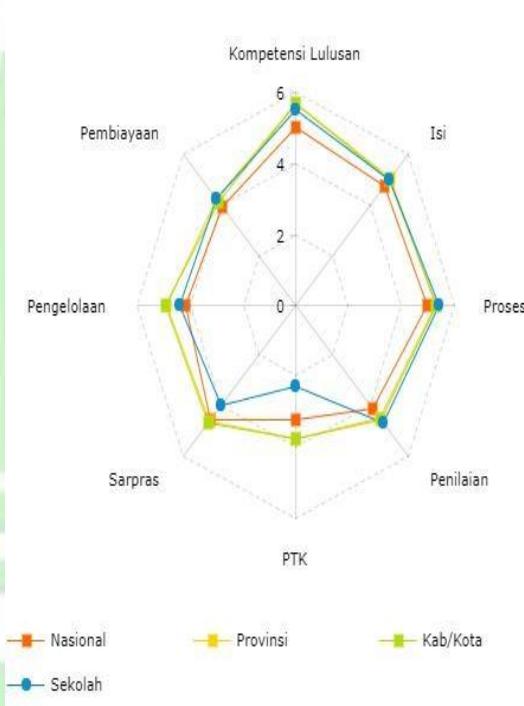
A. Implementasi Evaluasi Diri Sekolah dalam Pemetaan Pemenuhan Mutu

Pemetaan mutu satuan pendidikan secara nasional dilakukan dengan bantuan aplikasi yang dikembangkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan. Instrumen evaluasi yang digunakan dalam aplikasi tersebut dikembangkan berdasarkan indikator-indikator SNP. Instrumen mutu tersebut diambil berdasarkan hasil dari kuesioner yang diisi oleh kepala sekolah, pendidik, peserta didik, komite dan juga wali murid. Setelah kuesioner tersebut terkumpul, maka tahap selanjutnya yakni merumuskan rapor penjaminan mutu pendidikan. Perumusan rapor tersebut disesuaikan dengan standar nasional pendidikan yaitu 8 standar. Dalam setiap standar itu terdapat Standar, Indikator, Sub Indikator. Dari sini dapat dipetakan sesuai dengan standar masing-masing dan juga kebutuhan peningkatan pemenuhan mutu. Instrumen data yang telah diperoleh

dapat digunakan oleh satuan pendidikan sebagai data evaluasi diri sekolah (EDS) untuk keperluan pemetaan mutu satuan pendidikan. Selanjutnya satuan pendidikan dapat memperdalam EDS dengan melakukan analisis peta mutu dan memperkaya data EDS secara kualitatif. Penjaminan mutu pendidikan merupakan upaya bagi peningkatan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Proses penjaminan mutu pendidikan harus dilakukan oleh semua pihak dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Sejak diterbitkannya Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional (saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) telah merintis berbagai upaya penjaminan mutu pendidikan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan mendorong pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) sebagai bagian penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan sebagai dasar dan landasan dalam menyusun strategi dan perencanaan peningkatan mutu pendidikan.

B. Pencapaian Nilai Rapor Mutu

gambaran umum capaian Standar nasional pendidikan. Potret pencapaian mutu SDN 1 Brotonegaran untuk masing- masing standar dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut :



Gambar 3.1

Nilai peta capaian standar nasional pendidikan
SDN 1 Brotonegaran sebagai berikut :

Tabel 3.1

No	Standar Nasional Pendidikan	Capaian 2017	Capaian 2018
1	Standar Kompetensi Lulusan	6,18	6,76
2	Standar Isi	5,82	6,12
3	Standar Proses	6,42	6,89
4	Standar Penilaian Pendidikan	6,11	6,67
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2,43	3,55
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4,46	4,42
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	6,2	6,32
8	Standar Pembiayaan	6,2	6,2

Berdasarkan tabel olahan rapor PMP tahun 2017 revisi tahun 2018 di atas, terlihat dengan jelas bahwa capaian mutu tingkat Sekolah dasar sampai tahun 2018 secara umum mendekati memenuhi standar nasional pendidikan. Peningkatan mutu yang paling baik terjadi pada standar kompetensi lulusan, meningkat 0,47 point dari 6,42 atau menuju SNP 4 pada tahun 2017 menjadi 6,89 atau SNP pada tahun 2017, dan capaian mutu

yang paling rendah berada pada standar sarana dan prasarana dengan nilai mutu menurun -0,04 point pada kategori Menuju SNP 3. Penilaian tersebut merupakan hasil dari musyawarah tim penjaminan mutu pendidikan sekolah (TPMPS). Yang merujuk pada rapor penjaminan mutu pendidikan.



Hal ini sesuai dengan kutipan yang menjelaskan tentang Pemetaan mutu di tingkat sekolah/madrasah dilaksanakan berdasarkan data dan informasi capaian SNP dari hasil pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah setiap akhir tahun. Peta mutu adalah matriks gambaran konkrit terkait kondisi ideal sesuai standar, kondisi riil sekolah/madrasah saat ini, deskripsi hasil analisis SWOT, hal yang perlu diperbaiki/ ditingkatkan, dan kebutuhan pendukung dalam memperbaiki/meningkatkan capaian mutu standar. Menjadi catatan penting bahwa titik tolak EDS sebagai bagian dari SPMI sama dengan titik tolak akreditasi sekolah/madrasah sebagai bagian dari proses SPME yakni delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sekolah/madrasah kemudian dapat memanfaatkan proses dan informasi dalam pemetaan mutu tersebut untuk mengidentifikasi strategi pemenuhan dan peningkatan mutu setiap standar dalam akreditasi sekolah/madrasah. Oleh karena itu, sekolah perlu memiliki Tim Akreditasi Sekolah atau Tim Pengembang Sekolah yang bertugas dan bertanggungjawab menganalisis hasil pemetaan mutu

SPMI menjadi bahan persiapan sekolah dalam melaksanakan akreditasi.

Seperti hasil wawancara kami kepada Kepala Sekolah sebagai berikut “dalam pemetaan mutu ini yang pertama kali kami lakukan adalah menentukan kegiatan/ aspek yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekolah kami. Salah satu kegiatan kami yaitu validasi rapor mutu. Dalam validasi ini kami memiliki beberapa instrumen mutu yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dari sini awal kegiatan itu dilaksanakan. Instrumen apa yang harus terpenuhi”.¹

Hal tersebut diperkuat dengan pengamatan peneliti ketika pertama kali mengamati kegiatan pembiasaan ini, mutu dan kualitas siswa nya sudah sesuai dengan perencanaan dalam penjaminan mutu apa belum. Dan juga bukti rapat koordinasi dalam merumuskan raport mutu yang dan juga evaluasi raport mutu demi meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah dasar negeri Brotongaran 1 ini.²

¹ Lihat transkrip wawancara 01/W/18-XII/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian

²Lihat transkrip dokumentasi 01/O/18-XII/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian.

Dari hasil dokumentasi ditemukan bahwa telah dilaksanakan penyusunan perencanaan penjaminan mutu internal dengan adanya rapat koordinasi persiapan pelaksanaan.³

Dalam pemetaan mutu ini, penulis menemukan beberapa hal yang menjadikan kurangnya kepuasan dalam pemenuhan pemetaan mutu. Tim penjaminan mutu pendidikan sekolah (TPMPS) yang seharusnya menjalankan semua kegiatan sekolah sesuai dengan tugas masing-masing. Kurangnya kesadaran menjadikan kegiatan terlaksana kurang efektif.

C. Kendala Implementasi Pemetaan Mutu

Dalam pemetaan mutu ini, penulis menemukan beberapa hal yang menjadikan kurangnya kepuasan dalam pemenuhan pemetaan mutu. Tim penjaminan mutu pendidikan sekolah (TPMPS) yang seharusnya menjalankan semua kegiatan sekolah sesuai dengan tugas masing-masing. Kurangnya kesadaran menjadikan kegiatan terlaksana kurang efektif.

³Lihat transkrip dokumentasi 01/D/18-XII/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian.

BAB IV

PERENCANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENDIDIKAN DASAR DI SDN 1 BROTONEGARAN

A. Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu

Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriteria atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Di dalam SPMI, standar yang dimaksud adalah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yang terdiri atas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti), dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut Standar Dikti yang ditetapkan oleh pendidikan dasar. Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi wajib melampaui SN Dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga merupakan kekhasan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Artinya, pendidikan dasar wajib menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti (yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri). Adapun penulis mendapatkan data seperti berikut :

Tabel 4.1

KODE	Program/STANDAR	Rekomendasi	Kegiatan	Penanggung jawab	Pemangku kepentingan yang dilibatkan	Waktu pelaksanaan	Bukti Fisik
1	Standar Kompetensi Lulusan	0					
1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	Guru wajib membekali siswa dengan pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, dan metakognitif	Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru harus menanamkan pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, dan metakognitif untuk semua mapel	Kepala Sekolah	Semua Guru dan peserta didik	Januari 2020 sd Juni 2020	Perangkat pembelajaran guru minimum 4 pengetahuan
2	Standar Isi	0					

2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap	Guru harus mengefektifkan kegiatan KKG	Melaksanaan KKG (Guru Kelas/Guru Mapel)	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala sekolah - Koord. mapel 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala sekolah - Guru mapel 	- Sesuai jadwal Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> - Program kerja MGMP S - Undangan - Daftar hadir - Notulen - Foto kegiatan
2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan	Guru harus mengefektifkan kegiatan KKG	Melaksanaan KKG (Guru Kelas/Guru Mapel)	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala sekolah - Waka Kurikulum 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala sekolah - Waka Kurikulum - Koord. Mapel - Guru Mapel 	Januari 2020 sd Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Program kerja KKG - Undangan

							Daftar hadir - Notulen - Foto kegiatan
3	Standar Proses	0					
4	Standar Penilaian Pendidikan	0					
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0					
5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	Sekolah menyarankan guru yang tidak berkualifikasi linier untuk menyesuaikan kompetensi yang	Pembinaan Guru	Guru	- Kepala sekolah - Guru	Januari 2020	- Surat Pengantar - Surat Keterangan

		dibutuhkan					ngan Kulia h
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	Kepala sekolah wajib memberikan pembinaan rutin dan bimbingan khusus kepada guru terkait kompetensi kepribadian	Memberikan pembinaan kepada GTK terkait kepribadian	Kepala Sekolah	- Kepala sekolah - Waka Kurikulum	Januari 2020	- Surat Penga n tar - Format TT9
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik	Sekolah harus memiliki alat bukti berupa dokumen catatan komunikasi guru dengan masyarakat	Mengadakan bakti sosial pada peringatan hari besar keagamaan di tempat ibadah sekitar sekolah	Kepala sekolah	Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, tokoh masyarakat	Januari 2020	- Surat Penga n tar - Format TT9
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	0					

6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar	Sekolah mengajukan peralatan laboratorium IPA lewat DAK	Membeli peralatan laboratorium IPA	Kepala Sekolah	Kepala Sekolah, Kepala laboratorium	Januari 2020	SPJ dan Nota pembelian, Bukti fisik barang yang dibeli
6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar	Sekolah menyusun proposal pengajuan perbaikan paving ke komite	Rapat koordinasi dengan pengurus komite, dilanjutkan rapat pleno komite	Kepala sekolah, Ketua Komite	Kepala sekolah, Pengurus Komite, PTK, Orang tua/ wali	Januari 2020	Proposal, Undangan, Daftar hadir, Notulen, Dokumen entasi
6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai	Pengusulan RKB ke pemerintah	Mengusulkan RKB ke pemerintah	- Kepala sekolah	- Kepala sekolah - Waka Sarpras	Januari 2020	- Surat Pengantar - Profil Sekolah

							h - Propo s al
6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai	Pengadaan rak pojok baca untuk tiap kelas	Pengadaan rak pojok baca	- Kepala sekolah - Bendahar a BOS	- Kepala sekolah - Bendahara BOS	April 2020	SPJ dan Nota pembe lian, Bukti fisik barang yang dibeli
6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar	Menganggarkan pengadaan almari untuk penyimpanan dokumen sekolah di ruang pimpinan	Pengadaan almari penyimpanan dokumen sekolah	- Kepala sekolah - Bendahar a BOS	- Kepala sekolah - Bendahara BOS	Januari 2020	SPJ dan Nota pembe lian, Bukti fisik barang yang dibeli

6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar	Menggunakan ruang lain untuk dijadikan ruang guru					
6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar	Kepala sekolah menganggarkan peralatan dan perlengkapan UKS yang sesuai standar dengan bertahap					
6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar	Sekolah mengusulkan ruang gudang kepada pemerintah					
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	0					
7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik	Kepala sekolah harus mampu membagi waktu secara efektif terkait tugasnya	Rapat /pembinaan PTK secara rutin	Kepala Sekolah	- Kepala Sekolah - Semua guru	Juli 2019 s.d Juni 2020	Undangan, Daftar hadir, Notulen, Foto Kegiatan

							n
7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik	Kepala sekolah harus menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi siswa	Melaksanakan perbaikan gasebo dan tempat duduk di taman sekolah	Kepala Sekolah	- Kepala Sekolah - Semua guru	Desember 2019	SPJ, Nota pembelajaran, gasebo dan tempat duduk yang sudah layak - Notulen - Foto Kegiatan

7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan	Sekolah harus meningkatkan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum	TPK meningkatkan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum	Kepala Sekolah	Kepala Sekolah dan TPK	Juli sd. September 2019	-Buku pendukung dan pengembangan kurikulum, Dokumen 1 Kurikulum Sekolah - Dokumen kurikulum
8	Standar Pembiayaan	0					

B. Penerapan Program Kegiatan dalam Perencanaan Pemenuhan Mutu

Berdasarkan paparan data di atas, penulis dapat menganalisa bahwa hasil dari perencanaan mutu berupa pemenuhan program kegiatan yang bertitik fokus pada standar sarana dan prasarana. Dalam hal ini karena mengacu pada hasil dari pemetaan mutu menjelaskan bahwa standar sarana dan prasarana mendapatkan nilai dengan kategori paling rendah. Maka dari itu dalam program kegiatan ini dapat direncanakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Program perencanaan tersebut meliputi laboratorium IPA sesuai standar, tempat bermain/lapangan sesuai standar, Kondisi laboratorium IPA layak pakai dan Kondisi ruang perpustakaan layak pakai. Segala bentuk penentuan kegiatan direncanakan guna untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Bahkan dalam hal ini, sesuai dokumen di atas, adalah yang sangat menentukan semua kegiatan dalam 1 tahun kedepan. Data di atas dapat kita ketahui juga, bahwa perencanaan program kegiatan tidak semua standar terpenuhi. Ada beberapa standar pendidikan nasional yang masih kosong. Dari hasil wawancara kami mengenai dengan perencanaan

pemenuhan mutu yakni untuk perencanaan SPMI ini berawal dari raport mutu yang disitu terdapat beberapa indikator yang berasal dari isian angket semua warga sekolah, setelah itu dilakukanlah pemetaan dari setiap indikator standar. Kemudian dari setiap indikator tersebut ada penanggung jawab standar yaitu TPMPS. Setiap TPMPS itu merumuskan, indikator mana yang harus diangkat dan dijadikan program kegiatan sekolah. Setelah itu, dikumpulkan semua rencana program ke ketua TPMPS. Ketua TPMPS dan kepala sekolah melakukan musyawarah untuk perencanaan peningkatan mutu yang lebih baik.¹ Dengan penjelasan tersebut, sesuai dengan kutipan kami yaitu menjelaskan tentang Perencanaan Pemenuhan Mutu. Secara konkrit, dokumen perencanaan pemenuhan mutu di sekolah diwujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) atau Rencana Kerja Sekolah (RKS) untuk kemudian dilanjutkan dengan menyusun dokumen Rencana Anggaran Pengembangan Sekolah (RAPS) atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Sekolah/madrasah perlu menganalisis

¹ Lihat transkrip dokumentasi 02/W/18-XII/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian.

informasi yang terdapat dalam dokumen peta mutu yang telah dibuat untuk menetapkan kebijakan terkait prioritas program pengembangan sekolah pada setiap standar. Bagi sekolah yang telah memperoleh akreditasi tapi masih belum meraih status terakreditasi A atau bahkan masih memperoleh status Tidak Terakreditasi (TT), penetapan prioritas program kerja pengembangan sekolah juga sangat penting untuk mempertimbangkan indikator-indikator dalam standar yang pada saat penilaian akreditasi 3 dilaksanakan masih memiliki skor yang rendah. Bagi sekolah yang telah memperoleh status akreditasi A, pertimbangan penetapan prioritas ini dapat difokuskan pada standar yang sesuai aturan penyekoran akreditasi memiliki bobot skor tertinggi, yakni standar yang paling erat kaitannya dengan proses pembelajaran serta pada standar yang menjadi kriteria utama pemberian status akreditasi, yakni standar sarana prasarana, dimana nilainya tidak boleh berada di bawah skor 68.

Dalam perencanaan pemenuhan mutu, semua pihak TPMPS harus bekerja sama dengan baik demi terwujudnya mutu yang baik. Selain itu juga, perlu pemilahan-pemilahan program kegiatan dalam

perencanaan dengan jeli, agar tidak timbul masalah ketika dilaksanakan.

Hal tersebut diperkuat dengan pengamatan peneliti ketika mengamati dokumentasi program perencanaan mengenai tantangan nyata antara pendidikan 5 tahun ke depan dengan pendidikan saat ini di Sekolah Dasar Negeri Brotonegaran 1 ini.²

Dari hasil observasi dengan kepala sekolah ditemukan bahwa telah dilaksanakan penyusunan perencanaan penjaminan mutu internal.³

C. Solusi Program Kegiatan Perencanaan Mutu

Dalam perencanaan pemenuhan mutu, semua pihak TPMPS harus bekerja sama dengan baik demi terwujudnya mutu yang baik. Selain itu juga, perlu pemilahan- pemilahan program kegiatan dalam perencanaan dengan jeli, agar tidak timbul masalah ketika dilaksanakan.

² Lihat transkrip dokumentasi 02/W/18-XII/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian.

³ Lihat transkrip dokumentasi 02/O/18-XII/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian.

BAB V

PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENDIDIKAN DASAR DI SDN 1 BROTONEGARAN

A. Implementasi Pemenuhan Mutu

Implementasi pemenuhan mutu satuan pendidikan adalah realisasi seluruh program dan kegiatan yang telah dirancang dan telah tertuang dalam dokumen perencanaan pemenuhan mutu satuan pendidikan yang harus dikerjakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Seluruh pemangku kepentingan di satuan pendidikan harus memiliki komitmen untuk mengimplementasikannya. Proses implementasi dari rencana tersebut perlu dijabarkan dan diatur bagaimana pelaksanaannya nanti dalam level ruang kelas, level antar jenjang kelas dan level satuan pendidikan agar pelaksanaan perencanaan tersebut berjalan secara optimal. Rencana, pelaksanaan, dan pemantauan program kegiatan selalu disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Langkah yang dilakukan sekolah dalam pelaksanaan pemenuhan mutu :

- a. Menetapkan penanggung jawab kegiatan.

- b. Penanggung jawab menyusulkan tim organisasi pelaksana serta pihak-pihak yang akan dilibatkan.
- c. Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan.
- d. Menetapkan bukti fisik yang mendukung keterlaksanaan kegiatan.

B. Pengendalian Pelaksanaan Pemenuhan Mutu

Berdasarkan capaian standar nasional pendidikan SDN 1 Brotonegaran dapat diketahui tabel di bawah ini :

Nomor	Standar Nasional Pendidikan	Capaian 2017	Capaian 2018
1	Standar Kompetensi Lulusan	6,18	6,76
2	Standar Isi	5,82	6,12
3	Standar Proses	6,42	6,89
4	Standar Penilaian Pendidikan	6,11	6,67
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2,43	3,55
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4,46	4,42
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	6,2	6,32
8	Standar Pembiayaan	6,2	6,2

Tabel 5.1

Tabel di atas menjelaskan capaian mutu sekolah

dasar sampai tahun 2018. Capaian ini dijadikan dasar

untuk menindak lanjuti program kegiatan pada tahun 2019/2020 yang akan dijalankan, baik program tersebut berhasil maupun belum berhasil. Tabel di atas berisikan 8 standar nasional pendidikan dan juga capaian nilai nya. Dari tabel ini, penulis dapat menetapkan bahwa program yang harus dijalankan untuk program kegiatan kedepan yakni bertitik fokus ke standar sarana dan prasarana. Dalam hal ini ditemui bahwa capaian mutu yang paling rendah berada pada standar sarana dan prasarana dengan nilai mutu menurun -0,04 point pada kategori Menuju SNP 3. Berikut ini adalah pengendalian pelaksanaan pemenuhan mutu :

Tabel 5.2

Permasalahan : peserta didik memiliki minat baca yang rendah						
Program	rekomendasi	Kegiatan	penanggungjawab	Pemangku kepentingan	Waktu pelaksanaan	Bukti fisik
Memiliki laborat	Sekolah mengajukan	Membeli peralatan laboratorium	Kepala Sekolah	Kepala Sekolah, Kepala	Januari 2020	SPJ dan Nota pembeli

orium	peralatan			laboratori		an,
-------	-----------	--	--	------------	--	-----

IPA sesuai standar	laborarium IPA lewat DAK	IPA		um		Bukti fisik barang yang dibeli
Memiliki tempat bermain /lapangan sesuai standar	Sekolah menyusun proposal pengajuan perbaikan paving ke komite	Rapat koordinasi dengan pengurus komite, dilanjutkan rapat pleno komite	Kepala sekolah, Ketua Komite	Kepala sekolah, Pengurus Komite , PTK, Orang tua/ wali	Januari 2020	Proposal, Undang an, Daftar hadir, Notulen , Dokumentasi
Kondisi laboratorium IPA layak pakai	Pengusulan RKB ke pemerintah	Mengusulkan RKB ke pemerintah	- Kepala sekolah	- Kepala sekolah - Waka Sarpras	Januari 2020	- Surat Pengantar - Profil Sekolah - Proposal
Kondisi ruang perpustakaan	Pengadaan rak pojok baca	Pengadaan rak pojok baca	- Kepala sekolah - Bendah	- Kepala sekolah - Bendahar	April 2020	SPJ dan Nota pembelian,

layak	untuk		ara BOS	a BOS		Bukti
-------	-------	--	---------	-------	--	-------

pakai	tiap kelas					fisik baran g yang dibeli
-------	------------	--	--	--	--	---------------------------------------

Standar sarana dan prasarana mempunyai beberapa program kegiatan guna untuk memenuhi mutu. Dengan menjalankan beberapa program yaitu:

1. Laboratorium IPA sesuai standar

Sekolah terlebih dahulu mengajukan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam melalui DAK. Dalam kegiatan ini, pemangku yang berkepentingan adalah kepala sekolah dan juga kepala laboratorium. Dalam pengamatan penulis ketika observasi, terlihat memang laboratorium IPA saat ini jauh dari kata layak. Peralatan laboratorium IPA pun juga masih kurang memadai jika dibuat dalam pembelajaran berlangsung. Disisi lain, kepala laboratorium juga belum ada. Dalam rangka pemenuhan mutu yang lebih baik. Maka pihak yang terlibat berusaha sebaik mungkin, demi terwujudnya Lab. IPA yang memadai.

2. Tempat bermain/lapangan sesuai standar

Sekolah menyusun proposal pengajuan paving ke komite. Dengan diadakan rapat koordinasi dengan pengurus komite, dilanjutkan ke rapat pleno. Hal ini pemangku kepentingan yang terlibat yakni Kepala sekolah, Pengurus Komite , PTK, Orang tua/ wali.

3. Kondisi laboratorium IPA layak pakai

Sekolah mengusulkan RKB ke pemerintah. Dalam hal ini yang dijadikan bukti berupa Surat Pengantar, Profil Sekolah, Proposal.

4. Kondisi ruang perpustakaan layak pakai

Sekolah mengadakan rak pojok baca untuk setiap kelas. Dalam pengadaan rak pojok baca ini yang menjadi pemangku kepentingan yaitu kepala sekolah dan bendahara sekolah. Demi terwujudnya mutu yang lebih maka pihak yang terkait harus berusaha menjalankan program tersebut.

Keterangan di atas yang menjadi program dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan mutu yang lebih baik. Hanya saja setelah adanya observasi dan juga wawancara kepada pihak yang terkait, penulis dapat menyimpulkan bahwa kondisi lapangan saat ini yang bisa berjalan dengan baik hanyalah

pengadaan rak pojok baca. Pojok baca ini terlihat sangat membantu peserta didik dan juga pendidik dalam mengembangkan wawasan demi terwujudnya mutu yang sesuai dengan SNP.

Berikut ini dideskripsikan beberapa aktivitas pemenuhan mutu yang dilakukan oleh SDN 1 Brotonegaran. Penulis memebrikan rekomendasi pelaksanaan aktivitas tambahan yang seharusnya dilakukan untuk dapat memenuhi SNP:



Tabel 5.3

KODE	Program/STANDAR	Rekomendasi	Kegiatan	Penanggung jawab	Pemangku kepentingan yang dilibatkan	Waktu pelaksanaan	Bukti Fisik
1	Standar Kompetensi Lulusan	0					
1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	Guru wajib membekali siswa dengan pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, dan metakognitif	Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru harus menanamkan pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, dan metakognitif untuk semua mapel	Kepala Sekolah	Semua Guru dan peserta didik	Januari 2020 sd Juni 2020	Perangkat pembelajaran guru memuat 4 pengetahuan
2	Standar Isi	0					

2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap	Guru harus mengefektifkan kegiatan KKG	Melaksanaan KKG (Guru Kelas/Guru Mapel)	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala sekolah - Koord. mapel 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala sekolah - Guru mapel 	- Sesuai jadwal Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> - Program kerja MGMP S - Undangan - Daftar hadir - Notulen - Foto kegiatan
2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan	Guru harus mengefektifkan kegiatan KKG	Melaksanaan KKG (Guru Kelas/Guru Mapel)	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala sekolah - Waka Kurikulum 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala sekolah - Waka Kurikulum - Koord. Mapel - Guru Mapel 	Januari 2020 sd Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Program kerja KKG - Undangan

							Daftar hadir - Notulen - Foto kegiatan
3	Standar Proses	0					
4	Standar Penilaian Pendidikan	0					
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0					
5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	Sekolah menyarankan guru yang tidak berkualifikasi linier untuk menyesuaikan kompetensi yang	Pembinaan Guru	Guru	- Kepala sekolah - Guru	Januari 2020	- Surat Pengantar - Surat Keterangan

		dibutuhkan					ngan Kulia h
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	Kepala sekolah wajib memberikan pembinaan rutin dan bimbingan khusus kepada guru terkait kompetensi kepribadian	Memberikan pembinaan kepada GTK terkait kepribadian	Kepala Sekolah	- Kepala sekolah - Waka Kurikulum	Januari 2020	- Surat Penga n tar - Format TT9
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik	Sekolah harus memiliki alat bukti berupa dokumen catatan komunikasi guru dengan masyarakat	Mengadakan bakti sosial pada peringatan hari besar keagamaan di tempat ibadah sekitar sekolah	Kepala sekolah	Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, tokoh masyarakat	Januari 2020	- Surat Penga n tar - Format TT9
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	0					

6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar	Sekolah mengajukan peralatan laboratorium IPA lewat DAK	Membeli peralatan laboratorium IPA	Kepala Sekolah	Kepala Sekolah, Kepala laboratorium	Januari 2020	SPJ dan Nota pembelian, Bukti fisik barang yang dibeli
6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar	Sekolah menyusun proposal pengajuan perbaikan paving ke komite	Rapat koordinasi dengan pengurus komite, dilanjutkan rapat pleno komite	Kepala sekolah, Ketua Komite	Kepala sekolah, Pengurus Komite, PTK, Orang tua/ wali	Januari 2020	Proposal, Undangan, Daftar hadir, Notulen, Dokumen entasi
6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai	Pengusulan RKB ke pemerintah	Mengusulkan RKB ke pemerintah	- Kepala sekolah	- Kepala sekolah - Waka Sarpras	Januari 2020	- Surat Pengantar - Profil Sekolah

							h - Propo s al
6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai	Pengadaan rak pojok baca untuk tiap kelas	Pengadaan rak pojok baca	- Kepala sekolah - Bendahar a BOS	- Kepala sekolah - Bendahara BOS	April 2020	SPJ dan Nota pembe lian, Bukti fisik barang yang dibeli
6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar	Menganggarkan pengadaan almari untuk penyimpanan dokumen sekolah di ruang pimpinan	Pengadaan almari penyimpanan dokumen sekolah	- Kepala sekolah - Bendahar a BOS	- Kepala sekolah - Bendahara BOS	Januari 2020	SPJ dan Nota pembe lian, Bukti fisik barang yang dibeli

6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar	Menggunakan ruang lain untuk dijadikan ruang guru					
6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar	Kepala sekolah menganggarkan peralatan dan perlengkapan UKS yang sesuai standar dengan bertahap					
6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar	Sekolah mengusulkan ruang gudang kepada pemerintah					
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	0					
7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik	Kepala sekolah harus mampu membagi waktu secara efektif terkait tugasnya	Rapat /pembinaan PTK secara rutin	Kepala Sekolah	- Kepala Sekolah - Semua guru	Juli 2019 s.d Juni 2020	Undangan, Daftar hadir, Notulen, Foto Kegiatan

							n
7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik	Kepala sekolah harus menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi siswa	Melaksanakan perbaikan gasebo dan tempat duduk di taman sekolah	Kepala Sekolah	- Kepala Sekolah - Semua guru	Desember 2019	SPJ, Nota pembelajaran, gasebo dan tempat duduk yang sudah layak - Notulen - Foto Kegiatan

7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan	Sekolah harus meningkatkan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum	TPK meningkatkan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum	Kepala Sekolah	Kepala Sekolah dan TPK	Juli sd. September 2019	-Buku pendukung dan pengembangan kurikulum, Dokumen 1 Kurikulum Sekolah - Dokumen kurikulum
8	Standar Pembiayaan	0					

Program dan kegiatan di atas yang dilakukan untuk pemenuhan mutu seharusnya dilakukan secara terintegrasi dan terpadu agar dapat diperoleh capaian yang signifikan. Mutu Pelaksanaan pemenuhan mutu diarahkan pada dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, terkait program pemenuhan mutu input, proses dan hasil pembelajaran, termasuk peningkatan standar kompetensi tenaga pendidik, pengadaan dan pemanfaatan media, alat, bahan pembelajaran, pengembangan perangkat dan substansi pembelajaran, pengelolaan penilaian proses dan hasil pembelajaran, dan pelaporan hasil penilaian pembelajaran. Di sisi lain, program yang terkait dengan pemenuhan mutu non-pembelajaran, yakni pemenuhan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, kualitas pengelolaan institusi sekolah, dan pengelolaan pembiayaan program sekolah/madrasah. Berbagai jenis produk program kerja harus dibuat dan atau dihasilkan selama pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam bentuk dokumen maupun non-dokumen. Sekolah perlu memiliki sistem filing produk pelaksanaan pemenuhan mutu secara teratur dan sistematis karena produk-produk ini kemudian tidak

saja dapat dimanfaatkan sebagai bukti fisik pada pelaksanaan EDS juga akan menjadi bukti fisik penting bagi pemenuhan data dan informasi pendukung pada pelaksanaan akreditasi sekolah⁴⁷.

Dari hasil dokumentasi ditemukan bahwa telah dilaksanakan penyusunan perencanaan penjaminan mutu internal dengan adanya tim penjaminan mutu pendidikan sekolah.⁴⁸

C. Kendala Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar

Dalam pemaparan di atas, sudah sangat jelas bahwa kurangnya sinkronisasi antara dokumen yang ada dalam sekolah dengan teori yang menjelaskan tentang pemetaan mutu dan ditambah lagi penyampaian dari hasil wawancara. Maka dari itu, seharusnya menyelaraskan segala sesuatu pelaksanaan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan.

⁴⁷Lihat transkrip wawancara 03/W/18-XII/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian.

⁴⁸Lihat transkrip dokumentasi 03/D/18-XII/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian.

BAB VI

EVALUASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENDIDIKAN DASAR DI SDN 1 BROTONEGARAN

A. Penyusunan Indikator Evaluasi

Evaluasi dalam pemenuhan mutu merupakan tahapan pengujian yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah pelaksanaan dan hasil pemenuhan mutu sesuai dengan strategi yang direncanakan dan apakah rencana tersebut diimplementasikan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan. Penulis mendapatkan data sebagai berikut :

Tabel 6.1 Tahap Pemetaan Mutu

o	Kegiatan/Aspek	Uraian	Bukti Fisik yang Dimiliki	Permasalahan yang Terjadi	Solusi yang Dilakukan	Rencana Perbaikan
1	Penyediaan dokumen untuk pemetaan	Kebutuhan dokumen yang	Rapor mutu, SK TPMP S	Masih terjadi ketidaksesuaian antar	Menggunakan pemetaan mutu berdasarkan	Bersama-sama tim TPMPS untuk

	n mutu	dibutuhkan untuk pemetaan mutu		isian dapodik dan PMP dengan hasil rapor mutu	rkan dari hasil validasi rapor manual	memvalidasi laporan mutu dibuktikan dengan dokumen yang relevan
2	Bedah/validasi rapor mutu	Bedah rapor mutu digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan	Rapor mutu dan hasil validasi rapor mutu, analisis data mutu, analisis	Kurangnya kerja sama penanggung jawab standar pada Tim TPMPS dalam	Pembinaan dan motivasi kepada Tim TPMPS dalam menganalisis rapor mutu.	Sosialisasi/bimtek kepada Tim TPMPS dengan mengundang pengawas/fasda

		dari masing-masing sub indikator standar	s lingkungan dalam menentukan	alisis rapor mutu.		
3	Keterlibatan stakeholder dalam pemetaan mutu	Dukungan pihak eksternal dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu sekolah	MoU, buku tamu, dokumentasi	Kurangnya partisipasi pihak eksternal dalam pelaksanaan SPMI	Mengajukan permohonan kepada pihak eksternal untuk mendukung kegiatan pelaksanaan	Mengundang dan membuat proposal permohonan dukungan atau bimbingan kepada pihak eksternal pada saat pelaksanaan

		h			SPMI	aan kegiatan perbaikann mutu
4	Analisis lingkungan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan	Keterlibatan lingkungan sekolah (masyarakat) dalam mememukakan kekuatan dan kelemahan mutu sekolah	Rapor mutu	Kurangnya pemahaman lingkungan tentang pentingnya kegiatan SPMI	Memberikan pemahaman kepada lingkungan khususnya masyarakat tentang pentingnya kegiatan SPMI	Sosialisasi kepada lingkungan (masyarakat)

5	Penentu an akar masalah dan penetapan alternatif f solusi	Tindak lanjut dari analisi s mutu yang diguna kan untuk melaks anakan kegiata n perbai kan mutu dengan mengg unakan skala priorit as	Analisis rapor mutu, renca na progra m peme nuhan mutu	Terbata snya waktu pelaksa naan, tenaga dan biaya dalam melaks anakan kegiata n perbaik an mutu	Menyus un dan mengal okasika n anggara n sesuai dengan rencana kegiata n perbaia kan mutu	Dalam penentua n alternatif solusi sekolah mengam bil keputusa n kegiatan dengan menggun akan skala prioritas agar pelaksa n aan kegiatan perbaik an mutu
---	---	--	--	---	---	---

						<p>efektif dan efisien, dan untuk perencanaan perbaikan mutu pada kelemahan yang lainnya dilaksanakan diwaktu berikutnya. Sehingga program SPMI akan</p>
--	--	--	--	--	--	--

						terus dilaksana n sekolah secara berkala dan continue
--	--	--	--	--	--	--

Tabel 6.2 Tahap Penyusunan Rencana Pemenuhan

No	Kegiatan/Aspek	Uraian	Bukti Fisik yang Dihasilkan	Permasalahan yang Terjadi	Solusi yang Dilakukan	Rencana Perbaikan
1	Penentuan program	Sekolah menentukan program berdasarkan dari rekomendasi	Dokumen RKS dan RKAS, dokumen rekomendasi	Terlalu banyak program pada tiap-tiap standar	Memilih sub indikator yang belum mendapatkan nilai baik	Menggunakan skala prioritas dalam penentuan program.

		easi pemetaan mutu	endasi		pada rapor mutu	Mengga bungkan beberapa program yg setara menjadi satu program .
2	Penentu an kegiatan	Sekolah menent ukan kegiata n berdas arkan progra m	Doku men RKAS , Notule n rapat (priori tas)	Adalah waktu pelaksa naan kegiata n sangat bergant ung pada	Memanf aatkan hari libur atau diluar jam efektif. Dan mencari	Membu at jadwal alternati f dan mencari peluang untuk mendap atkan

				kesemp atan (jadwal dan agenda dari dinas) dan keterse diaan biaya	pinjama n dana yang tidak berbung a untuk pelaksa naan kegiatan Menata Jadwal	pinjama n biaya (non bunga) dalam pelaksa naan kegiatan Skala prioritas
3	Penentu an volume kegiatan	Sekolah menent ukan volume kegiata n, kemapu an dan kebutuh an	Propo sal Kegiat an, Doku men RKAS , Notule n rapat	Banyak nya kebutu han (jumlah pemen uhan, peserta dll) tidak	Melaksa nakan kegiatan secara bertaha p sesuai skala prioritas	Melaksa nakan kegiatan secara bertaha p sesuai skala prioritas Mengaj

		berdasarkan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan		berimbang dengan kemampuan (biaya)		ukuran pemecahan masalah kepada stakeholder terutama komite dan wali murid
4	Pengalokasian anggaran	Sekolah mengalokasikan anggaran sesuai dengan juknis BOS berdasarkan	Proposal Kegiatan, Dokumen RKAS, Notulen rapat	Keterlibatan pencairan dana BOS ke sekolah Resiko sekolah	Mentor berikan pembuat laporan tiap tribulan dan mengajukan	Mengadakan komunikasi dan konsultasi dengan tim saber pungli

		<p>rkan volume dan jenis kegiata n yang akan dilaksa nakan</p>	<p>Reko menda si dari komit e dan kelas orang tua</p>	<p>dalam mengaj ukan sumban gan sukarel a kepada komite</p>	<p>kepada dinas pendidi kan untuk mencair kan dana BOS tepat waktu Mengad akan pendaka tan kepada komite dan kelas orang tua</p>	<p>untuk memper oleh informa si yang jelas tentang hal hal partisip asi wali murid terkait permen dikbud no 75 tahun 2016 tentang komite sekolah dan permen</p>
--	--	--	---	---	---	---

					untuk membra ntu pemeca han masalah biaya pendidi kan yang tidak terjangk au boleh dan BOS	dikbud no 1 tahun 2018 tenang Juknis BOS 2018 serta perbub no 31 tahun 2016 tentang sumban gan sukarela
5	Penentu an sumber pendana an	Sekolah menent ukan sumber dana	Propo sal Kegiat an, Doku	Pemah aman wali murid terhada	Mengad akan pendaka tan kepada	Mengad akan pendaka tan kepada

		yang bisa digunakan pada kegiatan yang akan dilaksanakan (BOS)	men RKAS, Notulen rapat Dasar hukum yang berlaku dalam penentuan sumber pendanaan	p kebutuhan sekolah khususnya sumbangan sukarela masih rendah (Penger-tian sekolah gratis menjadi senjata wali murid untuk menola	komite dan kelas orang tua untuk membantu pemecahan masalah sumber pendanaan pendidikan yang tidak terjangkau atau boleh dan	komite dan kelas orang tua untuk membantu pemecahan masalah sumber pendanaan pendidikan yang tidak terjangkau dan BOS
--	--	--	---	---	--	---

				k permohonan sumbangan) Phobia terhadap penegasan tim saberpungli	BOS Konsultasi pada tim saberpungli Memaksimalkan sumber dana yang ada	Konsultasi pada tim saberpungli
6	Penyusunan jadwal	Sekolah membuat jadwal kegiatan sesuai dengan	Kalender pendidikan, peraturan SKB 5	Terjadi tumpang g tindih agenda sekolah dan kegiatan	Sinkronisasi antara prioritas kegiatan pemanfaatan	Segara membuat jadwal sebelum tahun ajaran

		kalende r pendidi kan dan SKB 3 menteri	mente ri, RKS dan RKAS	n sekolah yang sifatny a menda dak sehingg a kesulita n dalam menyus un jadwal pelaksa naan kegiata n	mutu dan Kalende r pendidi kan, peratua n SKB 5 menteri Penjad walan ulang dan gunakan waktu libur	baru dilaksan akan dan jadwal alternati f
7	Integras i hasil penyusu	Tersedi anya integras	Propo sal kegiat	Keterb atasan dana	Penyada ran kepada	Rapat / sosialisa si

	nan rencana pemenu han ke dalam RKS/R KAS	i kegiata n pemenu han mutu dengan RKS dan RKAS	an RKS dan RKAS	dalam pemen uhan mutu pendidi kan	stakehol der tentang pembia yaan kegiatan pemenu han mutu yang tidak hanya mengan dal kan pada BOS	kepada paguyu ban orang tua tentang kebutuh an sekolah model
--	---	--	--------------------------	--	---	---

Tabel 6.3 Tahap Pelaksanaan Pemenuhan Mutu

No	Kegiata n/Aspek	Uraia n	Bukti Fisik yang Dihasil kan	Permas alahan yang Terjadi	Solusi yang Dilaku kan	Renca na Perbai kan
1	Pelatiha	Works	Daftar	Waktu	Sharing	Memfa

	n IT di SDN 1 Broton egaran	hop penggu naan teknol ogi inform asi sebaga i media pembel ajaran untuk guru SDN 1 Broton egaran	hadir, Dokum entasi foto, hasil produk kegiata n worksh op	yang sangat terbatas dalam pelaksa naan pelatiha n IT	dengan teman sejawat diluar jam mengaj ar	silitasi dan membe rikan kelong garan kepada guru untuk saling bertuka r informa si atau pengeta huan tentang IT
2	Pembela jaran luar kelas	Kunju ngan pembel ajaran	Propos al, SPPD, daftar	Memerl ukan biaya diluar	Masala h pembia yaan	Mengh adirkan dan memfas

	/Outing Class	ke tempat industri, tempat sejarah dan wirausaha di lingkungan masyarakat sesuai dengan tiap kelas	hadir, dokumentasi, laporan siswa tentang objek yang dikunjungi (rekaman video)	anggaran sekolah	diserahkan diserahkan kepada kelas orang tua masing masing	ilitasi kelas orang tua untuk mendaklanjuti agenda kegiatan tersebut
	penambahan toilet	Upaya sekolah untuk mencukupi	RAB sederhana tentang penam	Keterlambatan pencairan dan BOS	Merencanakan pinjaman dana yang	Meminjamilah kepada orang yang

		kebutuhan toilet	bahan toilet, Dokumentasi fisik,		tidak berbunga untuk pelaksanaan kegiatan	bersedia memberikan pinjaman tanpa bunga dan anggunan
3	Penambahan tanaman TOGA di SDN 1 Brotonegaran sebagai syarat sekolah	Mewujudkan kebiasaan aan sekolah sehat dan membiasakan perilaku	RKAS, Inventaris, Dokumentasi, Bukti pembelian, PPN			

	sehat	hidup sehat di lingku ngan SDN 1 Broton egaran				
--	-------	---	--	--	--	--

Berdasarkan paparan data diatas, penulis dapat menganalisa bahwa dalam monitoring atau evaluasi sudah berjalan baik. Terdapat beberapa kegiatan yang dievaluasi setelah adanya pelaksanaan. dan juga, dalam setiap kegiatan pasti ada revisi evaluasi. Hal ini terjadi demi terlaksananya kegiatan dengan baik. Disisi lain diatas juga terdapat beberapa instrumen monitoring mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, dan wali murid. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tahap evaluasi ini berusaha dijalankan dengan maksimal. Penulis menambahkan hasil wawancara dengan salah satu tim evaluasi yakni Siklus dalam sistem penjaminan mutu terdiri dari 5 siklus, yakni penetapan, pelaksanaan,

evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Dalam evaluasi dari tahun ke tahun yang sering terjadi hanya sampai evaluasi saja. Dalam 2 siklus selanjutnya yakni pengendalian dan juga peningkatan ini belum tersentuh. Karna ada sebagian dari TPMPS belum begitu memahami akan tugasnya. Maka dari itu, pemenuhan standar belum begitu maksimal mengakibatkan sampai tahap evaluasi. Dan hal seperti ini, tetap dijalankan dari tahun ke tahun. Sampai terwujudnya mutu yang lebih baik.⁴⁹ Disisi lain penulis juga menambahkan kutipan mengenai evaluasi mutu bahwa Evaluasi/Audit Mutu pada dasarnya adalah merupakan bentuk kegiatan pengendalian terhadap proses dan hasil pelaksanaan pemenuhan mutu, khususnya untuk melihat apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaan dan hasilnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Oleh karena kegiatan audit bersifat pengendalian maka pelaksanaannya perlu menggunakan dokumen (format-format)audit yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau dapat dimodifikasi oleh tim auditor berdasarkan kebutuhan. Dokumen tersebut antara lain 4

⁴⁹ Lihat transkrip dokumentasi 05/W/18-XII/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian

: (1) lembar perencanaan audit, (2) lembar kerja audit, (3) lembar temuan audit, dan (4) lembar tindak lanjut hasil audit. Peluang untuk memanfaatkan tahapan audit mutu untuk keperluan persiapan akreditasi sekolah/madrasah terletak pada dokumen audit tersebut. Informasi yang dituliskan di dalam setiap lembar format audit menjadi data penting untuk mengecek upaya sekolah/madrasah dalam memenuhi capaian setiap standar selama melaksanakan program kerjanya yang telah direncanakan. Informasi dan data hasil audit juga menjadi salah satu penuntun penting bagi sekolah untuk mempertimbangkan apa dan bagaimana strategi menyiapkan diri dalam melaksanakan akreditasi.

B. Solusi Implementasi Evaluasi

Setelah adanya monitoring dapat digunakan untuk menerima masukan (umpan balik) bagi perbaikan pelaksanaan pengelolaan sekolah. Sedangkan evaluasi dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memberi masukan terhadap keseluruhan komponen pengelolaan sekolah, baik pada konteks, input, output, maupun outcome nya.

BAB VII

STANDAR BARU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENDIDIKAN DASAR DI SDN 1 BROTONEGARAN

A. Penetapan Mutu Baru

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Munculnya data kualitas pendidikan Indonesia di atas tentu bukan tanpa sebab. Proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan harapan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya mutu pendidikan. Suatu kenyataan yang dihadapi dunia pendidikan di lembaga pendidikan formal saat ini, adalah rendahnya kualitas manajerial pembelajaran baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan maupun cara pengendaliannya. Oleh karena itu, rekonstruksi terhadap manajemen program-

program pembelajaran mutlak dilakukan demi tercapainya tujuan yang diharapkan⁵⁰.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 91 dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP)⁵¹. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah bertujuan menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Sistem penjaminan mutu pendidikan berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Data yang penulis dapatkan sebagai berikut :

⁵⁰ Yanty K Manoppo, “Analisis Penerapan Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Kota Gorontalo”, *Tadbir Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 02 Nomor 2 Agustus 2014, 187.

⁵¹ Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 283-284.

1. penetapan standar mutu baru,
2. penetapan mutu baru sebagai keberhasilan spmi di sekolah,
3. dokumen SNP program kegiatan EDS, RKS, RKT, RKAS,
4. penggunaan dana bos sangat terbatas,
5. mengajukan program beserta pendanaan kepada komite, dan
6. mengajukan proposal.

B. Implementasi Penetapan Standar Baru

Dalam siklus yang terakhir ini, penulis dapat menganalisis bahwa penetapan standar mutu baru ini berdasarkan hasil dari evaluasi sekolah. Mulai dari program-program kegiatan sampai rencana kerja anggaran sekolah. Jika dalam suatu program perencanaan dilanjutkan dengan pelaksanaan dan mendapat nilai evaluasi dengan baik. Maka pemenuhan mutu tersebut bisa dikatakan berhasil. Begitu sebaliknya, ketika mutu setelah dievaluasi masih mendapat nilai yang kurang berarti mutu tersebut belum berjalan dengan baik. Dan mutu tersebut harus diulangi di tahun berikutnya sampai tercapai sesuai dengan acuan standar nasional pendidikan. Hasil- hasil yang diperoleh dari

tahapan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, dan audit mutu internal serta ditambah dengan masukan dari seluruh *stakeholders*, digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan peningkatan mutu. Hasil dari wawancara yakni Jadi berangkat dari evaluasi penjaminan mutu internal, dilanjut dengan pengendalian mutu internal. Setelah kedua siklus ini terpenuhi, kita bisa mengetahui dan menilai sejauh mana rencana kegiatan berjalan. Jika masih butuh evaluasi lagi, berarti tahun depan harus diterapkan rencana program tersebut sampai tercapai mutu yang diinginkan. Begitu sebaliknya, dalam peningkatan sistem penjaminan mutu internal ini sudah berjalan baik, dan juga mendapat nilai rapor yang memuaskan. Bisa dikatakan bahwa rencana kegiatan tersebut baik dan bisa melanjutkan rencana kegiatan setelahnya, yakni membuat rencana sistem penjaminan mutu internal baru. disisi lain itu tetap mempertahankan nilai mutu yang telah dicapai. Penulis juga menambahkan mengenai Penetapan Standar Mutu Pada tahap ini sekolah menetapkan standar mutu baru sebagai patokan program tahun berikutnya. Mutu baru tersebut boleh jadi merupakan standar diatas SNP jika berdasarkan

hasil audit mutu capaian tahun sebelumnya telah memenuhi SNP atau bahkan melampaui SNP. Selain itu, pada tahap ini juga sekolah perlu menetapkan strategi baru bagi pemenuhan mutu pada standar yang memperoleh nilai sedang dan kurang. Penetapan standar mutu baru yang melampaui SNP akan menjadi modal ekstra bagi sekolah dalam upaya memperoleh status akreditasi terbaik. Demikian pula, penetapan strategi baru bagi pemenuhan mutu yang belum memenuhi SNP merupakan tindakan kuratif bagi sekolah/madrasah untuk secara terus-menerus berupaya memperbaiki diri dan meningkatkan mutunya. Hal ini akan menjaga konsistensi peningkatan capaian mutu setiap standar SNP dari tahun ke tahun sampai tiba masa penilaian akreditasi sekolah/madrasah.

C. Solusi Pemenuhan Standar Baru

Berdasarkan pemaparan di atas, sekolah harus bisa menetapkan standar mutu baru yang bisa digunakan sebagai patokan program kegiatan berikutnya.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai “*Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar di SDN 1 Brotonegaran*” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemetaan mutu ditinjau dari 8 standar nasional pendidikan. Dari ke 8 standar nasional tersebut terpecah menjadi indikator dan sub indikator yang mendiskripsikan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau tidak. Pengambilan sub indikator berdasarkan nilai mutu yang masih memiliki kategori rendah. semua pemetaan mutu yang diprogramkan sekolah pada hakekatnya adalah berdasarkan kebutuhan sekolah.
2. Hasil dari perencanaan mutu berupa pemenuhan program kegiatan yang bertitik fokuskan pada standar sarana dan prasarana. Dalam hal ini karena mengacu pada hasil dari pemetaan mutu menjelaskan bahwa standar sarana dan prasarana mendapatkan nilai dengan kategori paling rendah. Maka dari itu dalam program kegiatan ini dapat

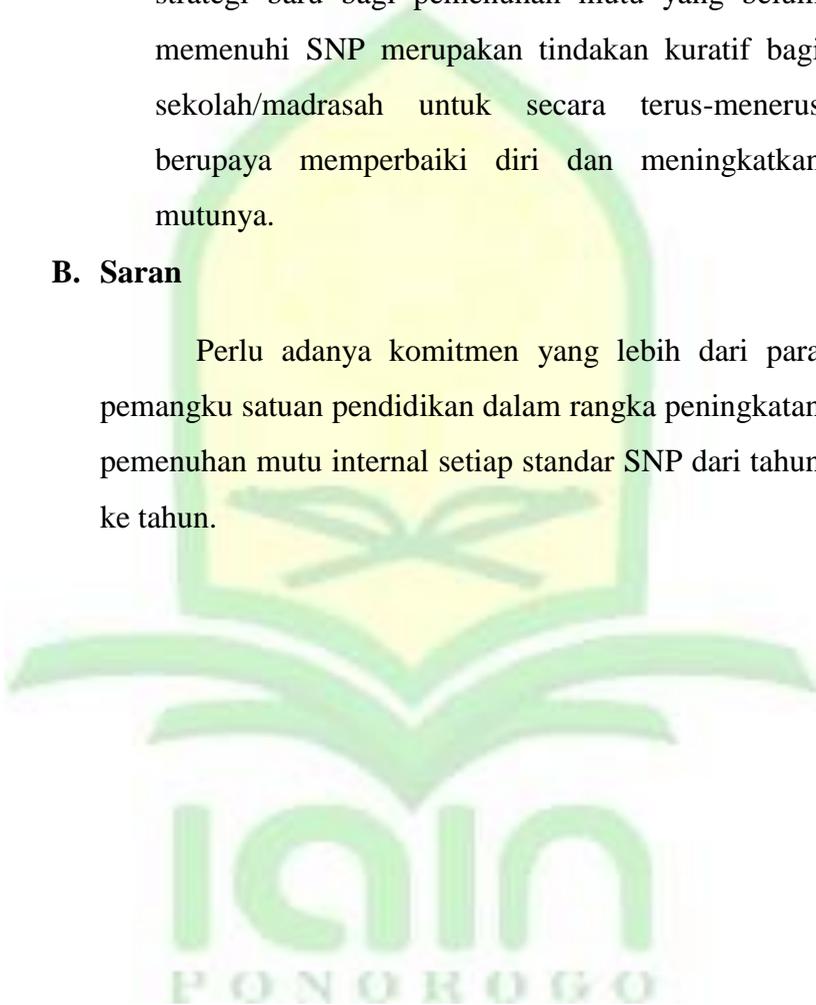
direncanakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

3. Menetapkan bahwa program yang harus dijalankan untuk program kegiatan kedepan yakni bertitik fokus ke standar sarana dan prasarana. Dalam hal ini ditemui bahwa capaian mutu yang paling rendah berada pada standar sarana dan prasarana dengan nilai mutu menurun -0,04 point pada kategori Menuju SNP.
4. Pengadaan rak pojok baca sangat lah berguna dan sangat membantu pendidik maupun peserta didik. Baik dalam mengembangkan wawasan atau dalam melakukan pembiasaan untuk membaca.
5. Sekolah menetapkan standar mutu baru sebagai patokan program tahun berikutnya. Mutu baru tersebut boleh jadi merupakan standar diatas SNP jika berdasarkan hasil audit mutu capaian tahun sebelumnya telah memenuhi SNP atau bahkan melampaui SNP. Selain itu, pada tahap ini juga sekolah perlu menetapkan strategi baru bagi pemenuhan mutu pada standar yang memperoleh nilai sedang dan kurang. Penetapan standar mutu baru yang melampaui SNP akan menjadi modal

ekstra bagi sekolah dalam upaya memperoleh status akreditasi terbaik. Demikian pula, penetapan strategi baru bagi pemenuhan mutu yang belum memenuhi SNP merupakan tindakan kuratif bagi sekolah/madrasah untuk secara terus-menerus berupaya memperbaiki diri dan meningkatkan mutunya.

B. Saran

Perlu adanya komitmen yang lebih dari para pemangku satuan pendidikan dalam rangka peningkatan pemenuhan mutu internal setiap standar SNP dari tahun ke tahun.



Daftar Pustaka

- A. Sani dkk, Ridwan *Sistem Penjaminan Mutu Internal*,
Tangerang: Tsmart, 2018.
- Ahmad Saebani, Beni, *Metode Penelitian*, Bandung: CV
Pustaka Setia, 2008.
- Ainun haris 2012
(<http://nasrudinhadi.blogspot.co.id/2012/05/makalah-standar-kompetensi-lulusan-skl.html>) di akses pada
tanggal 3 Desember 2019 pukul 21:48
- Ariani..Manajemen Kualitas:Pendekatan Sisis Kualitatif.
Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- Danim, Sudarwan, *Visi Baru Manajemen Sekolah; dari Unit
Birokrasi ke Lembaga Akademik.*
- Djuhan, Widah, *Sosiologi Pendidikan*, Ponorogo: STAIN
Press, 2016.
- E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung:
PT. Remaja Rosda Karya, 2004.
- Fattah, Nanang, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*,
Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA, 2013.
- Fitri yafrianti 2015 (<http://sakura-ilmu.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-dan-hakikat->

standar-isi.html) di akses pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 21:41

Hadis, Abdul, dan Nurhadi, Manajemen Mutu Pendidikan, Bandung : PenerbitAlfaBeya, 2010.

Hamza B. Uno (https://scholar.google.co.id/scholar?cites=14190154992714899268&as_sdt=2005&scioldt=0,5&hl=id) di akses di akses pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 20:40

Heri Sucitro, Program Peningkatan Mutu Pendidikan,(<http://www.sdit-nurhidayah.net> diakses 11 Mei 2008)

<http://repository.unsada.ac.id/324/3/bab%202.pdf> di akses tgl 3 Desember 2019

<http://tesissikap-penjaminanmutu> Ahmad Abroza. Diakses pada tanggal: 1 November 2019.

Imzakiah 2014 (<http://kiaelf.blogspot.co.id/2014/05/standar-nasional-pendidikan.html>) di akses pada tanggal 3 Desember 2019

Jurnal Alivermana Wiguna, Upaya Meningkatkan sikap spiritual pada Peserta Didik,<http://journal.umpo.ac.id/index.php/alasasiya/article/view/684/564>. Diakses pada tanggal 1 November 2019.

Lihat dalam Robert C. Bogdan dan Biklen, *Qualitative Research for Education; An introduction to theory and methods*, Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1982.

Lincoln ,Guba, *Effective Evaluation*, San Fransisco: Jossey-Bass Publishers, 1981.

Lofland, *Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis* Belmont, Cal: Wadsworth Publishing Company, 1984.

M. N, Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*. Edisi Kedua, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.

Marito 2012
(<http://maritosukses.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-penilaian.html>) di akses pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 22:02

Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran System Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Safiria Insani Press, 2003), hlm: 66-124.

Milakarmila 2013 (http://karya-karmilamila.blogspot.co.id/2013/01/standar-isi-makalah-kurikulum.html) di akses pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 21.42

Mubashyiroh, Implementasi Manajemen Pembelajaran dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Madrasah Unggulan di MTs Negeri Lamongan, Skripsi UIN Malang, 2007.

Mulyadi, Kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan budaya mutu, Malang : UIN MALIKI Press, 2010.

Mutu pendidikan, (<http://www.gosublogger.com/> diakses 23 maret 2020)

Nana Syaodih Sukmadinata Dkk, Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah; Konsep, Prinsip, dan Instrument, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm: 9-11.

Norman K, Denzin, Sociological Methods New York: McGraw-Hill, 1978.

Novriantini chemsunj 2010 (<https://noviastrinich.emsunj.wordpress.com/2010/05/30/standar-proses-pendidikan/>) di akses pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 21.47

Nurul fauziah 2017 (<https://www.scribd.com/document/362887248/Standar-Proses-Merupakan-Kriteria-Mengenai-Pelaksanaan-Pembelajaran-Pada-Satuan-Pendidikan-Dasar-Dan->

Satuan-Pendidikan-Dasar-Menengah-Untuk-Mencapai-K) di akses pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 21:44
Permendikbud No. 28 Tahun 2016

Rina

ratnasari 2012(<https://riedushine.wordpress.com/2012/12/31/standar-pendidik-dan-tenaga-kependidikan/>) di akses pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 21.51

Robert C. Bogdan & S.J. Taylor, Introduction to Qualitative Research Methods, New York: John Wiley, 1975.

S. Arcaro, Joremo , Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Sallis, E, Total Quality Management in Education, Jogjakarta : IRCiSoD, 2007.

Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam, Yogyakarta : Teras, 2009.

Suryadi dan H. A. R. Tilaar, Ace , Analisis Kebijakan Suatu Pengantar, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.

Syafuruddin , Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Umaedi, MPMBS, ([http://www.geocities. Com/pengembangan madrasah](http://www.geocities.Com/pengembangan-madrasah) diakses 23 maret 2020).

W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,
Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

